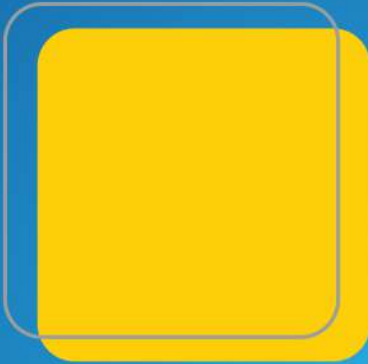


INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI LAMPUNG 2020



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI LAMPUNG 2020



Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung 2020

ISSN : 1907-4565

Nomor Publikasi : 18000.2106

Katalog : 4102002.18

Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm

Jumlah Halaman : xii + 94 halaman

Naskah :

BPS Provinsi Lampung

Penyunting :

BPS Provinsi Lampung

Desain Kover Oleh :

BPS Provinsi Lampung

Penerbit :

©BPS Provinsi Lampung

Pencetak :

CV. JAYA WIJAYA

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun
Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Lampung 2020

Pengarah :

Faizal Anwar

Penyunting :

Nurul Andriana
Gun Gun Nugraha

Penulis :

Mega Astuti
Gun Gun Nugraha

Pengolah Data :

Mega Astuti
Gun Gun Nugraha

Desain dan Tata Letak :

Mega Astuti
Gun Gun Nugraha

Kata Pengantar

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya alat dari pembangunan. Menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (United Nation Development Programme–UNDP).

Pembangunan manusia merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu ukurannya adalah Indeks pembangunan manusia (IPM) yang diperkenalkan oleh UNDP. Indeks pembangunan manusia mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, yaitu aspek umur panjang dan hidup sehat (*long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

Publikasi ini merupakan kajian dan analisa dari kegiatan eksplorasi data. Tujuan laporan ini untuk memberikan gambaran kepada pemerintah daerah Provinsi Lampung tentang status dan kondisi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Provinsi Lampung.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Bandar Lampung, Maret 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Lampung,



Ir. Faizal Anwar, MT.

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Bab 1 Pendahuluan	3
1.1. Perkembangan Pemikiran dan Konsep Pembangunan ...	3
1.2. Upaya Pemerintah Meningkatkan Sumber Daya Manusia	5
1.3. Tantangan Kualitas Sumber Daya Manusia	6
1.4. Pengukuran Pembangunan Manusia	8
Bab 2 Perkembangan Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung	13
2.1. Perkembangan Pembangunan Manusia	13
2.2. Tantangan Pembangunan Manusia	17
Bab 3 Tantangan Utama dalam Pencapaian Sasaran Kesehatan	25
3.1. Umur Harapan Hidup	26
3.2. Tantangan Pembangunan Manusia pada Dimensi Kesehatan	28
Bab 4 Tantangan Utama dalam Pencapaian Sasaran Pendidikan	43
4.1. Perkembangan Pencapaian Partisipasi Pendidikan Dasar	44
4.2. Tantangan Pembangunan Manusia pada Dimensi Pendidikan	47
Bab 5 Tantangan Pembangunan Manusia Bidang Ekonomi	51
5.1. Potret Kemiskinan di Provinsi Lampung	53
5.2. Karakteristik Defisiensi Lapangan Kerja Produktif dan Pekerjaan yang Layak	56

5.3. Tantangan dan Peluang Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	71
Bab 6 Disparitas Pembangunan Manusia	75
6.1. Disparitas Jenis Kelamin	76
6.2. Disparitas Antarkabupaten/kota	81
Bab 7 Tantangan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	89

<https://lampung.bps.go.id>

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 3.1 Indikator Morbiditas Provinsi Lampung, 2018–2020	30
Tabel 3.2 Indikator Morbiditas Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020	30
Tabel 4.1 APS dan APM di Provinsi Lampung, 2018–2020	45
Tabel 4.2 Persentase Desa Menurut Jarak ke Fasilitas Pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, 2019	48
Tabel 5.1 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase, dan Garis Kemiskinan di Provinsi Lampung, 2016–2020	56
Tabel 5.2 Perbandingan Upah Minimum Regional/Provinsi Sumatera (Rupiah), 2016–2020	59
Tabel 5.3 Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, Agustus 2019–2020	61
Tabel 5.4 Distribusi Pengeluaran Penduduk Menurut Kriteria Bank Dunia Provinsi Lampung dan Nasional, Maret 2020	70
Tabel 5.5 Panjang Jalan Negara dan Jalan Provinsi Provinsi Lampung Menurut Kondisi (Km), 2020	71

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 2.1	Perkembangan IPM Provinsi Lampung dan Indonesia, 2016–2020 14
Gambar 2.2	Status Pembangunan Manusia Menurut Provinsi, 2020 14
Gambar 2.3	Angka UHH Menurut Provinsi di Indonesia, 2020 15
Gambar 2.4	Angka HLS Menurut Provinsi di Indonesia, 2020 16
Gambar 2.5	Angka RLS Menurut Provinsi di Indonesia, 2020 16
Gambar 2.6	Pengeluaran Per kapita Menurut Provinsi di Indonesia, 2020 17
Gambar 2.7	Status Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020 18
Gambar 2.8	Angka UHH Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020 19
Gambar 2.9	Angka HLS Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020 20
Gambar 2.10	Angka RLS Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020 21
Gambar 2.11	Pengeluaran per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020 22
Gambar 3.1	Tren UHH Indonesia dan Provinsi Lampung, 2016–2020 27
Gambar 3.2	Angka UHH Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020 28
Gambar 3.3	Persentase Perempuan Usia 10 Tahun ke Atas yang Usia Kawin Pertama ≤ 16 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020 32
Gambar 3.4	Persentase Penolong Kelahiran Terakhir yang Ditangani Non Tenaga Medis Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, 2020 33

Gambar 3.5	Persentase Desa yang Sulit Mengakses Puskesmas Menurut Kabupaten/Kotadi Provinsi Lampung, 2019	34
Gambar 3.6	Persentase Desa yang Sulit Menjangkau Rumah Sakit Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Persen), 2019	35
Gambar 3.7	Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Desember 2018	36
Gambar 3.8	Persentase Dokter Spesialis di Rumah Sakit Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, Desember 2018	37
Gambar 3.9	Prevalensi Gizi dan Postur Badan Balita Provinsi Lampung, 2018–2019	38
Gambar 3.10	Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Tanah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020	39
Gambar 3.11	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Bersih Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020	40
Gambar 4.1	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Persen), 2020	46
Gambar 5.1	Tiga Dimensi dan Tujuan ke-8 SDGs	52
Gambar 5.2	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung dan Nasional, 2016–2020	55
Gambar 5.3	Kontribusi Sektor Dominan PDRB Provinsi Lampung (Persen), 2020	57
Gambar 5.4	Pertumbuhan Sektor Pertanian Provinsi Lampung dan Indonesia (Persen), 2016–2020	58
Gambar 5.5	Konsep <i>Windows of Opportunity</i>	61
Gambar 5.6	Perkembangan Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Ekonomi Formal dan Informal di Provinsi Lampung, Agustus 2018–2019	62
Gambar 5.7	Perkembangan Penduduk yang Bekerja di Sektor Formal/Informal dan Kota-Desa di Provinsi Lampung, Agustus 2018–2019	63
Gambar 5.8	Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2019	64
Gambar 5.9	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Lampung, 2019	66

Gambar 5.10	Jumlah Pekerja Tidak Penuh di Provinsi Lampung, Agustus 2018-2019	67
Gambar 5.11	Perkembangan Inflasi Gabungan Provinsi Lampung dan Indonesia, 2016-2020	69
Gambar 6.1	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Lampung, 2015-2019 (Tahun)	77
Gambar 6.2	Perkembangan Umur Harapan Hidup Laki-laki dan Perempuan Provinsi Lampung, 2015-2019 (Tahun)	78
Gambar 6.3	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Laki-laki dan Perempuan Provinsi Lampung, 2015-2019 (Tahun)	79
Gambar 6.4	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Laki-laki dan Perempuan Provinsi Lampung, 2015-2019 (Tahun)	80
Gambar 6.5	Perkembangan Pengeluaran Laki-laki dan Perempuan Provinsi Lampung, 2015-2019	80
Gambar 6.6	Selisih IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah, 2016-2020	81
Gambar 6.7	Selisih Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah, 2016-2020 (Tahun)	83
Gambar 6.8	Selisih Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah, 2016-2020 (Tahun)	84
Gambar 6.9	Selisih Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah, 2016-2020 (Tahun)	85
Gambar 6.10	Selisih Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah, 2016-2020 (Ribu Rupiah/Tahun)	85

BAB

1

Pendahuluan

<https://lampung.bps.go.id>

Pendahuluan

1.1. Perkembangan Pemikiran dan Konsep Pembangunan

Sebelum memasuki tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja (Todaro dan Smith). Pada perkembangan selanjutnya, pembangunan ekonomi berkembang menjadi suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional. Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan.

Fokus pembangunan terpenting menurut Sen adalah manusia itu sendiri. Manusia bukan sekedar buruh semata. Manusia bukan sekedar *homo economicus*. Pembangunan seharusnya merupakan proses yang memfasilitasi manusia mengembangkan hidup sesuai dengan pilihannya (*development as a process of expanding the real freedoms that people enjoy*). Pada tahun 1991, Bank Dunia (World Bank) menerbitkan suatu laporan yang menegaskan bahwa “tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan” (*World Development Report*, 1991).

Hasil kajian Mankiw *et. al.* (1992) menemukan bahwa 80 persen perbedaan pertumbuhan perekonomian antarnegara adalah disebabkan oleh faktor modal fisik dan modal manusia sedangkan 20 persen lagi sisanya karena faktor-faktor lain. Bila manusia mampu mengoptimalkan potensinya maka ia akan dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk kesejahteraan bersama. Manusia dapat mempunyai akses pada sumber daya ekonomi serta dapat memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesehatannya untuk bekerja agar dapat hidup dengan layak. Proses pembangunan harus dapat merealisasikan harapan-harapan tersebut. Fokus pada manusia inilah yang melandasi konsep pembangunan manusia.

Tujuan utama dari pembangunan manusia harus mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*Human*

Development Report, 1990). Pendekatan pembangunan manusia lebih memfokuskan pada perluasan pilihan masyarakat dengan bebas dan bermartabat. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat: pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia.

Namun demikian, pembangunan harus seimbang antara membangun kemampuan dengan memanfaatkan kemampuan. Proses pembangunan setidaknya-tidaknya harus menciptakan lingkungan untuk manusia baik sebagai individu, keluarga maupun masyarakat, mengembangkan kemampuannya secara optimal sehingga mempunyai cukup kesempatan (memanfaatkan kemampuannya) untuk dapat hidup yang produktif dan kreatif sesuai kebutuhan dan minatnya. Dengan kata lain, pembangunan manusia tidak hanya terfokus pada pembentukan kemampuan manusia seperti kesehatan yang lebih baik serta pengetahuan dan keterampilan. Tetapi proses pembangunan manusia juga perlu mempertimbangkan pemanfaatan kemampuan tersebut baik untuk bekerja, berlibur, serta kegiatan sosial politik lainnya. Dua sisi pembangunan tersebut harus berkembang secara seimbang. Ketimpangan akan berakibat pemborosan potensi manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua aspek kehidupan manusia.

Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang membentuk IPM.

United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan IPM sejak tahun 1990. Dalam perjalanannya, UNDP telah beberapa kali melakukan revisi metode penghitungan IPM. Hingga tahun 2010 UNDP melakukan revisi yang cukup besar dengan menyebutnya sebagai era baru pembangunan manusia. Dalam metode baru ini dikenalkan indikator harapan lama sekolah yang menggantikan indikator melek huruf dan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang menggantikan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Indonesia mulai menghitung IPM secara berkala setiap tiga tahun sejak 1996. Untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Keuangan dalam menghitung Dana Alokasi Umum (DAU), mulai tahun 2004 IPM dihitung setiap tahun. Dan sejak tahun 2014, indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM di Indonesia sudah mengacu pada metode baru yang diterapkan oleh UNDP dengan beberapa penyesuaian. Indikator pengeluaran per kapita digunakan sebagai proksi pendapatan yang menggantikan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang belum tersedia secara tahunan hingga tingkat kabupaten/kota. Angka *backcasting* dengan menggunakan metode baru tersedia mulai tahun 2010.

1.2. Upaya Pemerintah Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) kini tengah menjadi prioritas pembangunan pemerintah Indonesia dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Berbagai program yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan, baik di tingkat dasar menengah maupun pendidikan tinggi dioptimalkan untuk mendorong daya saing bangsa.

Tema pembangunan RPJMN 2020–2024 adalah Indonesia berprestasi menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan. Dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020–2024 terdapat tujuh agenda pembangunan, salah satunya berupaya untuk meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, meningkatkan derajat kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan *stunting*, angka kematian ibu, angka kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2019-2024 sejalan RPJMN 2020-2024 dengan visi Rakyat Lampung Berjaya (aman, berbudaya, maju dan berdaya saing, sejahtera) yang kemudian tertuang dalam misinya juga menyinggung masalah pemerataan kualitas pelayanan publik, konektivitas wilayah, dan kesejahteraan bersama.

Salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini

menunjukkan konsistensi pemerintah untuk melembagakan agenda SDGs ke dalam program pembangunan nasional.

Program SDGs menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Konsep SDGs ini berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 tentang isu *depletion* sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim yang semakin krusial, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. *Sustainable Development Goals* dibentuk oleh tiga pilar dengan 17 tujuan (*goals*) yang harus dicapai.

Di antara 17 tujuan SDGs, terdapat beberapa target yang berhubungan dengan pembangunan manusia, yaitu tujuan ketiga, tujuan keempat, dan tujuan kedelapan. Tujuan ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Sedangkan tujuan kedelapan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Hal ini menunjukkan pembangunan manusia selalu menjadi isu penting dalam perancangan dan strategi pembangunan berkelanjutan.

1.3. Tantangan Kualitas Sumber Daya Manusia

Beberapa indikator menunjukkan kualitas SDM Indonesia masih ketinggalan dibanding negara ASEAN lainnya. Salah satunya adalah *human capital index* atau indeks modal manusia yang digunakan untuk mengukur derajat manusia dalam tiga kriteria, yakni kelangsungan hidup, kuantitas dan kualitas pendidikan, juga kesehatan.

Indeks modal manusia mencerminkan produktivitas anak yang lahir hari ini sebagai pekerja masa depan, dibandingkan dengan kemungkinan yang bisa terjadi jika ia memiliki kesehatan yang baik dan pendidikan yang lengkap serta berkualitas tinggi.

Laporan Bank Dunia tahun 2020 menjelaskan bahwa skor indeks modal manusia diolah berdasarkan data baru dan diperluas untuk masing-masing komponennya. Menurut laporan tersebut, nilai indeks modal manusia (*human capital index (HCI)*) Indonesia pada tahun 2018 mencapai 0,53 poin sedangkan tahun 2020 mencapai 0,54 poin. Ini artinya bahwa secara rata-rata, anak-anak Indonesia yang lahir saat ini ketika usia 18 tahun ke depan dapat meraih 54 persen dari total potensi produktivitas maksimalnya. Indeks modal manusia Indonesia berada pada peringkat ke-6 di ASEAN. Daya saing SDM Indonesia dinilai masih lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga dengan pendapatan menengah di kawasan ASEAN seperti Vietnam yang mencapai 0,69 poin; Brunei Darussalam mencapai 0,63 poin; Malaysia mencapai 0,61 poin; dan Thailand mencapai 0,61 poin.

Sejalan dengan hal tersebut, sebuah penelitian menerangkan bahwa anak-anak Indonesia yang mengalami *stunting* pada tahun 1993 menunjukkan fungsi kognitif yang lebih rendah sebagai orang dewasa muda pada tahun 2014-2015, mengalami pendidikan formal yang lebih singkat, juga memiliki pendapatan yang lebih rendah saat dewasa. Menurut hasil kajian Collin *et. al.* (2018) diperkirakan jika Indonesia bisa menutup kesenjangan antara skor *human capital index* saat ini dan skenario ideal kesehatan penuh dan pendidikan pada tingkat 4 persen per lima tahun, nilai tengah rata-rata di antara negara-negara dalam basis data, perkiraan PDB per kapita akan menjadi 7,10 persen lebih tinggi pada tahun 2050.

Persentase *stunting* Indonesia tahun 2019 mencapai 27,67 persen. Hal ini patut menjadi perhatian mengingat angka tersebut lebih tinggi dibandingkan toleransi maksimal *stunting* yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO). Hal ini juga didukung oleh rendahnya kualitas pendidikan dan ketimpangan kualitas pendidikan antardaerah, menurut Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Ali Ghufron Mukti (2019) menjelaskan, bahwa akses pendidikan yang berkualitas di Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa.

Menurutnya, baru sekitar 8,50 persen atau 15,50 juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia yang mampu lulus dari perguruan tinggi. Sebanyak 26,30 persen berpendidikan SMA, dan sisanya yaitu 65,00 persen hanya mengenyam pendidikan sampai di tingkat SMP (22,60 persen) dan SD (42,40 persen). Padahal, dalam beberapa dekade ke depan Indonesia memiliki potensi menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Oleh sebab itu, pembangunan sumber daya manusia menjadi penentu dalam perubahan bagi kemajuan bangsa.

Indikator lainnya adalah skor PISA test yang merupakan sistem ujian yang diinisiasi oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk mengevaluasi sistem pendidikan dari 72 negara di seluruh dunia. Setiap tiga tahun, siswa berusia 15 tahun dipilih secara acak untuk mengikuti tes dari tiga kompetensi dasar yaitu membaca, matematika, dan sains. Skor PISA test Indonesia tahun 2018 belum membaik, berada pada peringkat 72 dari 77 negara yang berarti tingkat literasi dan kualitas SDM Indonesia sangat rendah.

1.4. Pengukuran Pembangunan Manusia

Indikator yang digunakan dalam publikasi ini adalah indeks komposit yang disebut indeks pembangunan manusia (IPM). Penyusunan indeks menggunakan tiga dimensi dasar yaitu kesehatan yang mencakup umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Masing-masing dimensi diukur menggunakan indikator-indikator tertentu. Pertama, dimensi kesehatan. Pilar ini diwakili oleh indikator usia harapan hidup pada waktu lahir. Umur harapan hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang untuk hidup terhitung sejak lahir. Angka ini mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Kedua, dimensi pendidikan. Dimensi ini diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka ini dihitung pada usia tujuh tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar dan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Sementara itu, rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai rata-rata lamanya sekolah (tahun) yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

Ketiga, dimensi ekonomi yang diwakili oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan daya belinya melalui konsep "*purchasing power parity*". Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan

ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012 = 100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

<https://lampung.bps.go.id>

BAB

2

**Perkembangan Pembangunan
Manusia di Provinsi Lampung**

Perkembangan Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung

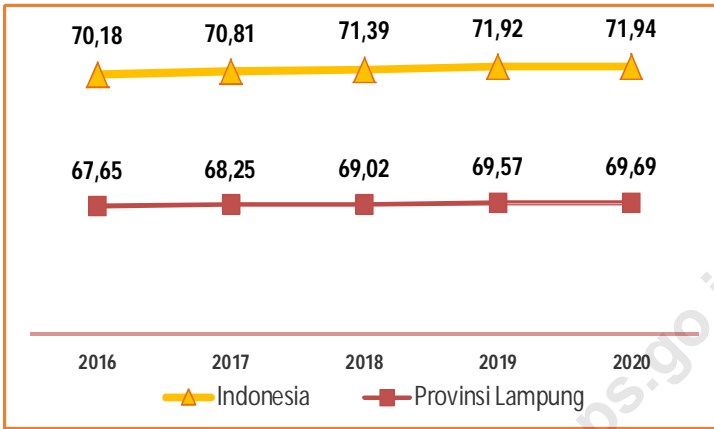
2.1. Perkembangan Pembangunan Manusia

United Nations Development Programme (UNDP) secara berkesinambungan mencatat perkembangan pembangunan manusia di berbagai negara. Pada tahun 2019, UNDP mencatat bahwa IPM di Indonesia mencapai 0,718. Capaian IPM ini mengalami peningkatan sebesar 0,006 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 0,712. Untuk rentang waktu antara tahun 1990–2019, nilai IPM Indonesia meningkat dari 0,523 menjadi 0,718 atau naik 37,28 persen. Berdasarkan status IPM tersebut, pembangunan manusia di Indonesia pada tahun 2019 dikategorikan berstatus “tinggi”. Saat ini Indonesia menduduki peringkat IPM ke-107 dari 189 negara.

Sejalan dengan perkembangan pembangunan manusia Indonesia, IPM Provinsi Lampung dari tahun ke tahun juga terus mengalami perbaikan. Namun demikian, hingga tahun 2020 capaian pembangunan manusia di Provinsi Lampung masih tergolong kategori “sedang”. Pada tahun 2016 besaran IPM Provinsi Lampung mencapai 67,65, terus naik hingga pada tahun 2020 mencapai 69,69 atau terjadi peningkatan 0,55 poin rata-rata per tahun.

Pada lingkup nasional, capaian Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata provinsi di Indonesia. Rata-rata IPM provinsi se-Indonesia pada tahun 2020 mencapai 71,08 dan IPM Indonesia pada tahun 2020 telah mencapai 71,94. Selain Provinsi Lampung, secara umum tren peningkatan IPM juga terjadi pada seluruh provinsi. Pertumbuhan rata-rata IPM per tahun Provinsi Lampung untuk tahun 2016–2020 lebih tinggi dari semua provinsi di Sumatera dengan capaian 0,81 persen sama dengan Provinsi Bengkulu.

Gambar 2.1
Perkembangan IPM Provinsi Lampung dan Indonesia, 2016-2020



Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Lampung

Sejak tahun 2016, status pembangunan manusia Indonesia sudah tergolong dalam kategori tinggi. Status IPM dikategorikan tinggi jika mempunyai skor $70 \leq \text{IPM} < 80$ dan berstatus sedang jika skor $60 \leq \text{IPM} < 70$. Pembangunan manusia di Provinsi Lampung tahun 2020 berstatus sedang bersama 10 provinsi lainnya di Indonesia, dengan status terdekat adalah Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Maluku. Capaian 22 provinsi lainnya telah menyandang status pembangunan manusia berkategori tinggi. Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang berstatus pembangunan sangat tinggi dengan angka IPM mencapai 80,77.

Gambar 2.2
Status Pembangunan Manusia Menurut Provinsi, 2020



Sumber: BPS RI

Tiga dimensi kehidupan yang digunakan untuk mengukur angka IPM terbentuk dari capaian indikator-indikator pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Dimensi Kesehatan

Umur harapan hidup (UHH) penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2020 adalah 70,65 tahun. Artinya bahwa seorang bayi yang lahir pada tahun tersebut mempunyai peluang untuk hidup sampai berusia sekitar 70 hingga 71 tahun. Umur harapan hidup penduduk Provinsi Lampung di bawah umur harapan hidup nasional yang mencapai 71,47 tahun. Provinsi DI Yogyakarta merupakan daerah dengan UHH penduduknya tertinggi di Indonesia yaitu 74,99 tahun. Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan capaian UHH terendah dengan capaian 65,06 tahun.

Gambar 2.3
Angka UHH Menurut Provinsi di Indonesia, 2020



Sumber: BPS RI

Dimensi Pendidikan

Harapan lama sekolah (HLS) Provinsi Lampung pada tahun 2020 mencapai 12,65 tahun. Ini berarti harapan anak untuk bersekolah di Provinsi Lampung dapat mencapai hingga jenjang akhir SLTA. Angka HLS Provinsi Lampung berada sedikit di bawah rata-rata nasional yang mencapai 12,98 tahun atau sampai pada tingkat menamatkan jenjang SLTA dan awal memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Provinsi DI Yogyakarta yang memang terkenal sebagai daerah pelajar memiliki HLS tertinggi dibanding provinsi lainnya dengan capaian 15,59 tahun. Provinsi Papua memiliki angka HLS terendah se-Indonesia dengan angka 11,08 tahun atau baru mencapai tingkat 2 SLTA.

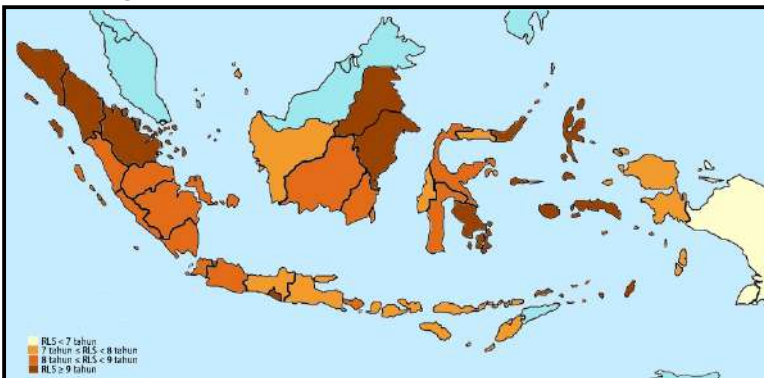
Gambar 2.4
Angka HLS Menurut Provinsi di Indonesia, 2020



Sumber: BPS RI

Indikator pendidikan lain yaitu rata-rata lama sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah Provinsi Lampung tahun 2020 mengalami sedikit kenaikan yang kini mencapai 8,05 tahun. Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Lampung usia 25 tahun ke atas masih cukup jauh di bawah program wajib belajar sembilan tahun yang sudah dicanangkan sejak tahun 1994. Rata-rata lama sekolah nasional mencapai 8,48 tahun atau hanya sedikit di atas RLS Provinsi Lampung. Provinsi DKI Jakarta memiliki RLS tertinggi yaitu mencapai 11,13 tahun. Provinsi Papua kembali menjadi provinsi dengan capaian RLS terendah yaitu 6,69 tahun atau hanya mencapai tingkat 1 SLTP.

Gambar 2.5
Angka RLS Menurut Provinsi di Indonesia, 2020



Sumber: BPS RI

Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi ditinjau dari faktor pengeluaran per kapita yang disesuaikan, merupakan ukuran pendekatan bagi besaran pendapatan per kapita penduduk sebagai komponen penyusun IPM. Biaya pengeluaran per kapita disesuaikan penduduk di wilayah Provinsi Lampung pada tahun 2020 sebesar Rp9,98 juta per kapita/tahun. Penurunan pengeluaran penduduk terjadi di seluruh provinsi tahun ini dan di Provinsi Lampung sendiri menurun 1,31 persen jika dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp10,11 juta. Penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan pada level nasional dan hampir di seluruh provinsi di Indonesia terjadi akibat efek langsung pandemi Covid-19 yang turut melanda Indonesia sejak Maret 2020. Dibanding nasional, nilai pengeluaran per kapita Provinsi Lampung lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai Rp11,30 juta per kapita/tahun. Nilai pengeluaran per kapita terbesar adalah di Provinsi DKI Jakarta yang mencapai Rp18,23 juta per kapita/tahun atau hampir dua kali pengeluaran di Provinsi Lampung. Sementara itu pengeluaran per kapita penduduk Provinsi Papua menjadi yang terendah yaitu hanya sebesar Rp6,95 juta per kapita/tahun.

Gambar 2.6
Pengeluaran Per Kapita Menurut Provinsi di Indonesia, 2020



Sumber: BPS RI

2.2. Tantangan Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan proses pembangunan yang berbasis manusia, di mana manusia ditempatkan sebagai tujuan akhir dan menuntut adanya pemerataan dalam pembangunan. Sampai dengan tahun 2020

capaian IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah IPM nasional. Bahkan pada seluruh indikator pembentuk IPM yaitu harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita disesuaikan menunjukkan bahwa capaian Provinsi Lampung masih berada di bawah nasional. Arah pembangunan ke depan harus lebih memperhatikan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan capaian kinerja terutama yang terkait dengan indikator-indikator pembentuk IPM. Akar permasalahan yang menghambat pembangunan manusia harus segera diidentifikasi dan dicarikan solusinya agar pembangunan bisa berjalan baik dan berkelanjutan.

Adanya disparitas dalam pembangunan antarkabupaten/kota juga merupakan tantangan tersendiri bagi pembangunan manusia. Jika dilihat per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, nampak bahwa pembangunan manusia masih belum cukup merata. Capaian pembangunan manusia di beberapa daerah sudah ada yang termasuk dalam kategori tinggi namun masih ada juga beberapa daerah yang capaiannya termasuk pada kategori sedang. Capaian IPM di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro contohnya, sudah jauh di atas IPM Provinsi Lampung secara umum yaitu masing-masing mencapai 77,44 dan 77,19. Bahkan kondisi terakhir tingkat pembangunan manusia Kabupaten Pringsewu juga telah masuk kategori tinggi mencapai 70,30, mengikuti jejak Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun sebelumnya. Sementara capaian pembangunan manusia di Kabupaten Mesuji merupakan yang terendah yaitu 63,63.

Gambar 2.7
**Status Pembangunan Manusia Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2020**



Sumber: BPS Provinsi Lampung

Disparitas pembangunan manusia dimulai dari disparitas capaian di masing-masing dimensi. Derajat kesehatan penduduk antarkabupaten/kota di Provinsi Lampung nampak masih belum merata. Hal ini tergambar dari UHH yang cukup jauh perbedaannya antardaerah.

Gambar 2.8
Angka UHH Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020



Sumber: BPS Provinsi Lampung

Capaian derajat kesehatan daerah perkotaan yang memang fasilitasnya lebih memadai relatif lebih baik. Umur harapan hidup Provinsi Lampung mencapai 70,65 tahun, yang berarti bahwa di tahun 2020 seorang bayi yang dilahirkan hidup di provinsi ini secara umum memiliki harapan bisa hidup hingga usia 70,65 tahun. Umur harapan hidup Kota Metro adalah yang tertinggi mencapai 71,63 tahun sementara Kota Bandar Lampung mencapai 71,37 tahun. Disparitas UHH antarkabupaten masih nampak terlihat. Umur harapan hidup tertinggi pada level kabupaten adalah Kabupaten Lampung Timur sudah mencapai 70,73 tahun sedangkan di Kabupaten Pesisir Barat terendah yaitu mencapai 63,50 tahun.

Ditinjau dari sisi pendidikan, disparitas capaian harapan lama sekolah (HLS) juga masih cukup tinggi. Anak-anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro tahun 2020 diharapkan dapat mengenyam pendidikan selama 14 tahun atau setara mengenyam pendidikan hingga lulus D2, sementara HLS penduduk di Kabupaten Mesuji,

Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Pesisir Barat belum mencapai 12 tahun atau setara menyelesaikan pendidikan hingga kelas XI.

Gambar 2.9
**Angka HLS Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Lampung, 2020**



Sumber: BPS Provinsi Lampung

Peningkatan indikator rata-rata lama sekolah (RLS) provinsi juga tercermin dari indikator RLS kabupaten/kota. Penduduk Kota Metro dan Kota Bandar Lampung yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata telah mengenyam hampir 11 tahun masa sekolah. Dengan kata lain, pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun di wilayah kedua kota tersebut relatif sudah terpenuhi. Selanjutnya diikuti Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat yang baru mencapai rata-rata setingkat kelas 2 SMP, sementara kabupaten lainnya hanya setingkat kelas 1 SMP. Bahkan di Kabupaten Mesuji RLS penduduk kurang dari tujuh tahun atau setara dengan baru menamatkan sekolah dasar.

Gambar 2.10
**Angka RLS Menurut Kabupaten/Kota
 di Provinsi Lampung, 2020**



Sumber: BPS Provinsi Lampung

Untuk indikator IPM dimensi ekonomi, secara relatif masih terlihat adanya disparitas antardaerah. Rata-rata pengeluaran riil penduduk Kota Bandar Lampung dan Kota Metro tahun 2020 adalah yang tertinggi masing-masing mencapai Rp12,20 juta dan Rp11,91 juta per kapita/tahun sedangkan pengeluaran penduduk terendah di Kabupaten Pesawaran sebesar Rp7,89 juta per kapita/tahun. Wilayah kabupaten yang memiliki pengeluaran penduduknya telah berada di atas biaya hidup rata-rata di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Pringsewu. Artinya untuk memenuhi kebutuhan hidup akan komoditas yang relatif sama, biaya hidup di ketiga wilayah tersebut cenderung lebih tinggi.

Gambar 2.11
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020



Sumber: BPS Provinsi Lampung



BAB

3

**Tantangan Utama dalam
Pencapaian Sasaran Kesehatan**

<http://lampung.bps.go.id>

Tantangan Utama dalam Pencapaian Sasaran Kesehatan

Kesehatan adalah faktor penting dalam proses pembangunan manusia dan menjadi dasar bagi pembangunan bidang lainnya. Pada sidang di Ottawa tahun 1986, WHO memperkenalkan konsep baru sehat produktif yang terangkum dalam The Ottawa Charter: "*Health is a source of everyday life, not merely the objective of living*". Konsep ini berpengaruh terhadap tujuan dari upaya kesehatan yang tidak lagi hanya sekedar mencapai kehidupan sehat individu atau masyarakat.

Kesehatan dapat dipandang sebagai fungsi produksi dan modal yang tahan lama sehingga mirip dengan stok barang ekonomi lain yang dapat berkurang atau bertambah sejalan pertambahan waktu atau umur. Bagi mereka yang mempunyai stok kesehatan yang selalu meningkat maka produksi mereka akan meningkat pula.

Apabila stok kesehatan ditunjang dengan stok faktor lain seperti pendidikan, modal, dan relasi maka nilai produksi akan lebih meningkat. Menurut Grossman (1972), jika stok faktor lain disebut X dan stok kesehatan adalah S maka hubungan pemanfaatan (utilitas) seseorang dapat dinyatakan dengan rumus $U = f(X,S)$.

Status kesehatan yang baik akan menjadikan seseorang lebih produktif sehingga mempunyai daya saing dalam bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak. Kesehatan yang rendah tidak akan memberikan sumbangan terhadap produktivitas dan daya saing sebagai pekerja. Jika peningkatan kualitas penduduk diabaikan, besar kemungkinan penduduk yang produktif menjadi tidak produktif, bahkan menjadi beban. Bahkan beban ini semakin besar jika yang benar-benar produktif hanya sebagian kecil dari kelompok usia produktif. Jika kondisi ini dibiarkan terus berlanjut maka akan berdampak pada kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

Mengingat kesehatan sangat berperan dalam meningkatkan kualitas manusia, maka menjadi keharusan pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang masih terus melingkupinya. Bab ini membahas aspek kesehatan terkait dengan permasalahan dan isu strategis di Provinsi Lampung, khususnya dalam konteks kontribusi kesehatan terhadap capaian pembangunan manusia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Meskipun IPM untuk kesehatan hanya diukur dari umur harapan hidup (UHH) dikarenakan indikator kesehatan lain lebih sulit untuk diperoleh datanya namun perlu juga membahas indikator status kesehatan lainnya dalam rangka meningkatkan umur harapan hidup. Indikator yang akan dibahas berdasarkan hasil eksplorasi data primer survei dan sensus yang dilakukan BPS (Sensus Penduduk, *Updating* Potensi Desa, Sakernas, dan Susenas).

Kesehatan dan Pembangunan Manusia

Pada tahun 1990, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan "*Decade of human development*" sebagai bagian dari "*Sustainable development of mankind*". Perubahan besar pemikiran peran kesehatan di negara maju tidak semuanya dapat dipahami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Hal ini terbukti dengan lahirnya UU No. 23/1992 tentang kesehatan yang masih berorientasi pada upaya kuratif. The United Nations Population Fund (UNFPA) menyatakan tahun 1992 sebagai "*The year of human resource development*" sebagai pertanda dimulai gerakan baru pembangunan kesehatan yang lebih menekankan pada pembangunan sumber daya manusia untuk kelangsungan pembangunan. Indikator keberhasilan yang digunakan adalah angka *human development index* (HDI).

Untuk melihat perkembangan proses pembangunan manusia bidang kesehatan yang telah dicapai digunakan indikator UHH, status gizi, serta angka morbiditas yang mencerminkan derajat kesehatan penduduk Provinsi Lampung.

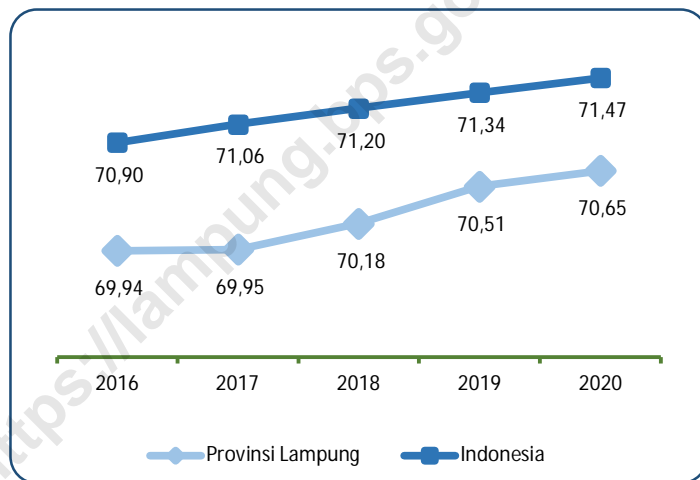
3.1. Umur Harapan Hidup

Umur harapan hidup diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak ia dilahirkan. Tingkat harapan hidup ini sangat dipengaruhi oleh derajat dan kondisi kesehatan. Jika tingkat kesehatan penduduk semakin baik maka diharapkan kesempatan untuk

bertahan hidup juga akan semakin besar. Sebaliknya, tingkat kesehatan yang buruk akan cenderung memperpendek usia hidup. Penghitungan UHH menggunakan metode tidak langsung berdasarkan data jumlah anak lahir hidup dan jumlah anak yang masih hidup sebagai input.

Umur harapan hidup penduduk Provinsi Lampung tahun 2020 mencapai 70,65 tahun dan berada di urutan ke-14 dari 34 provinsi di Indonesia. Di lingkup Pulau Sumatera, UHH penduduk Provinsi Lampung di bawah Provinsi Riau (71,60 tahun) dan Jambi (71,16 tahun).

Gambar 3.1
Tren UHH Indonesia dan Provinsi Lampung 2016-2020



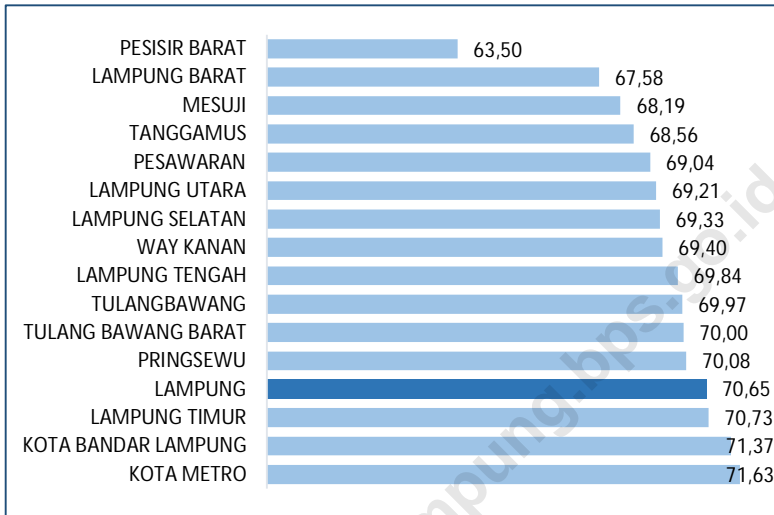
Sumber : BPS RI dan BPS Provinsi Lampung

Perkembangan lima tahun terakhir, UHH penduduk Provinsi Lampung cenderung meningkat. Jika pada tahun 2016 UHH penduduk mencapai 69,94 tahun, pada tahun 2020 mencapai 70,65 tahun. Artinya telah terjadi penambahan kesempatan hidup sebesar 0,71 tahun. Kondisi ini merefleksikan derajat kesehatan penduduk yang semakin membaik, di mana peningkatan usia tersebut lebih besar dibandingkan rentang waktu yang sama tahun sebelumnya. Bahkan dibandingkan angka nasional kenaikan usia harapan hidup ini relatif lebih tinggi.

Selama periode yang sama, UHH penduduk Indonesia meningkat 0,57 tahun, yakni dari 70,90 tahun naik menjadi 71,47 tahun. Namun demikian UHH penduduk Provinsi Lampung masih di bawah rata-rata penduduk Indonesia. Umur harapan hidup merupakan indikator output yang

prosesnya merupakan akumulasi dari berbagai hasil pembangunan dalam jangka waktu yang lama sehingga kenaikannya secara perlahan-lahan.

Gambar 3.2
Angka UHH Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020



Sumber : BPS Provinsi Lampung

Pada lingkup kabupaten/kota, UHH penduduk relatif bervariasi. Dua kota dan satu kabupaten memiliki harapan hidup di atas angka provinsi. Penduduk Kota Metro dan Kota Bandar Lampung mempunyai harapan untuk bertahan hidup sampai usia 71,63 dan 71,37 tahun, sementara penduduk Kabupaten Lampung Timur memiliki kesempatan bertahan hidup sampai berumur 70,73 tahun. Sebaliknya, umur harapan hidup terendah pada penduduk Kabupaten Pesisir Barat. Umur harapan hidup penduduk kabupaten ini mencapai 63,50 tahun. Sementara umur harapan hidup di kabupaten lainnya relatif bervariasi antara 67 hingga 70 tahun.

3.2. Tantangan Pembangunan Manusia pada Dimensi Kesehatan

Tantangan pembangunan manusia dimensi kesehatan ini terkait dengan permasalahan pada faktor-faktor yang mempengaruhi usia harapan hidup. Usia harapan hidup antara lain dipengaruhi oleh keluhan kesehatan dan angka morbiditas, frekuensi pernikahan dini, dan akses terhadap fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas.

A. Morbiditas

Pengertian morbiditas atau angka kesakitan adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sampai berakibat terganggunya aktivitas sehari-hari. Penduduk tidak dapat melakukan kegiatan seperti bekerja, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya secara normal sebagaimana biasanya. Angka morbiditas antara lain digunakan sebagai acuan bagi perhitungan premi asuransi jiwa.

Keluhan kesehatan adalah kondisi seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan baik karena penyakit akut dan penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminal, atau hal lain. Keluhan kesehatan mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk yaitu panas, batuk, pilek, asma/napas sesak/cepat, diare/buang-buang air, sakit kepala berulang, sakit gigi dan lainnya.

Sumber daya manusia yang sehat secara fisik diharapkan mampu menjadi manusia berkualitas sehingga dapat ikut berperan dalam pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Artinya jika penduduk di suatu wilayah sakit hingga mengakibatkan aktivitasnya terganggu maka penduduk di wilayah tersebut tidak dapat ikut berperan dalam mewujudkan kesejahteraan. Morbiditas (angka kesakitan) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk. Semakin tinggi morbiditas menunjukkan derajat kesehatan penduduk semakin buruk. Sebaliknya semakin rendah morbiditas menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang semakin baik.

Pada tahun 2020, persentase penduduk Provinsi Lampung yang mengalami keluhan kesehatan terlihat menunjukkan penurunan. Jika pada tahun 2019 tercatat persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan mencapai 35,32 persen, tahun 2020 persentasenya menjadi 31,35 persen. Ini berarti keluhan kesehatan penduduk berkurang sebanyak 3,97 persen. Mereka yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir sampai saat pencacahan, tidak seluruhnya sampai menyebabkan kegiatan sehari-hari menjadi terganggu. Hanya 14,49 persen yang mengalami sakit hingga mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Seiring dengan menurunnya keluhan kesehatan penduduk, persentase mereka yang sakit pun ikut berkurang yaitu sebesar 1,66 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.1

Indikator Morbiditas Provinsi Lampung, 2018-2020

Indikator Kesehatan	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Keluhan kesehatan (%)	30,66	35,32	31,35
Angka kesakitan (%)	14,12	16,15	14,49
Persentase berobat jalan	45,77	47,35	43,95

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Persentase mereka yang sakit dan harus melakukan pengobatan dengan mendatangi fasilitas kesehatan terlihat menurun. Pada tahun 2020, penduduk yang sakit dan melakukan pemeriksaan kesehatan turun 3,40 persen menjadi sebesar 43,95 persen. Hal ini dapat menjadi tolak ukur terkait intensitas penyakit sehingga tidak cukup bisa disembuhkan hanya dengan pengobatan sendiri. Berdasarkan data Susenas 2020, sebanyak 30,80 persen dari mereka yang berobat jalan telah menggunakan jaminan kesehatan.

Tabel 3.2

Indikator Morbiditas Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020

Kabupaten/Kota	Keluhan Kesehatan (%)	Angka Kesakitan
(1)	(2)	(3)
Lampung Barat	28,74	16,55
Tanggamus	26,06	11,61
Lampung Selatan	24,28	14,58
Lampung Timur	33,58	15,64
Lampung Tengah	39,41	17,01
Lampung Utara	39,43	17,30
Way Kanan	37,91	17,46
Tulang Bawang	28,78	13,08
Pesawaran	27,09	14,17
Pringsewu	32,98	16,80
Mesuji	22,50	11,12
Tulang Bawang Barat	33,03	14,08
Pesisir Barat	20,44	8,99
Bandar Lampung	27,14	9,43
Metro	33,82	16,93
LAMPUNG	31,35	14,49

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Dilihat menurut kabupaten/kota, angka morbiditas cukup bervariasi. Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan tertinggi di Kabupaten Lampung Utara sebesar 39,43 persen diikuti Kabupaten Lampung Tengah sebesar 39,41 persen. Penduduk yang sakit dan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari terbanyak berada di Kabupaten Way Kanan juga Kabupaten Lampung Utara dengan angka kesakitan masing-masing sebesar 17,46 persen dan 17,30 persen.

Kondisi sebaliknya yang berpengaruh mendukung peningkatan derajat kesehatan Provinsi Lampung berasal dari Kabupaten Pesisir Barat, di mana angka kesakitan penduduknya terkecil seiring dengan turunnya keluhan kesehatan yang juga terendah di kabupaten tersebut. Angka kesakitan penduduk Kabupaten Pesisir Barat tercatat sebesar 8,99 persen.

B. Pernikahan Dini

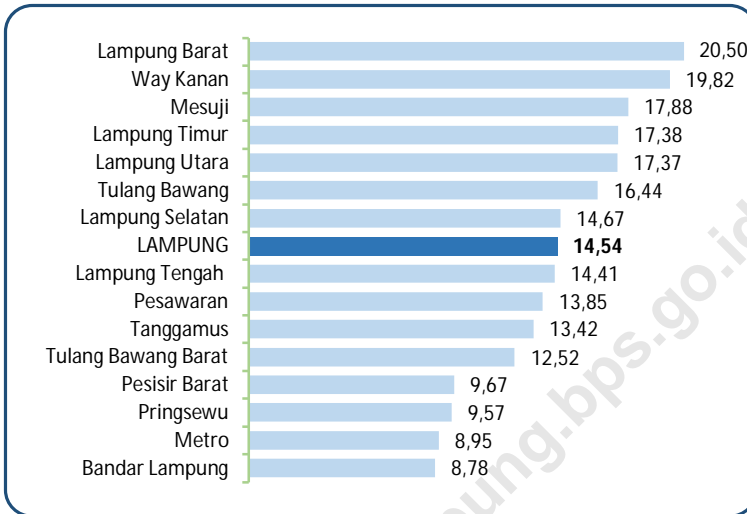
Usia kawin pertama yang relatif dini merupakan salah satu pemicu meningkatnya resiko kematian bayi. Sebab, pernikahan usia muda dapat meningkatkan resiko perempuan mengalami gangguan pada organ reproduksi. Jika hamil dan melahirkan pada usia yang terlalu muda maka akan meningkatkan resiko terjadi gangguan kehamilan maupun gangguan persalinan.

Berdasarkan data Susenas, mereka yang melakukan pernikahan dini adalah perempuan yang menikah pertama di usia 16 tahun atau kurang. Pada tahun 2020 sebanyak 14,54 persen perempuan di Provinsi Lampung yang menikah pertama pada usia kurang dari 16 tahun¹.

Menurut catatan BPS, kabupaten dengan persentase pernikahan muda tertinggi adalah Kabupaten Lampung Barat sebesar 20,50 persen. Kabupaten Way Kanan menempati posisi kedua terbesar dengan persentase 19,82 persen. Selanjutnya Kabupaten Mesuji berada pada peringkat ketiga sebesar 17,88 persen. Posisi pernikahan dini terendah adalah Kota Bandar Lampung hanya sebesar 8,78 persen.

¹Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun, dan untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun. Jika menikah di bawah usia 21 tahun harus disertai dengan izin kedua atau salah satu orang tua atau yang ditunjuk sebagai wali (pasal 6 ayat 2).

Gambar 3.3
Persentase Perempuan Usia 10 Tahun ke Atas yang Usia Kawin Pertama \leq 16 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020



Sumber : BPS Provinsi Lampung

Pernikahan di usia muda berpengaruh signifikan pada tingkat kematian bayi dan umur harapan hidup. Seorang ibu yang siap secara fisik dan mental akan mampu menekan tingkat kematian bayi. Bayangkan jika seseorang menikah secara dini, faktor psikologi dan kesehatan ibu akan buruk. Ketika terjadi demikian, akan berpengaruh pada tingkat kematian bayi sehingga umur harapan hidup pun akan berkurang.

Pengamat sosial Universitas Gadjah Mada (UGM) Hempri Suyatna mengatakan bahwa ada beberapa penyebab terjadinya pernikahan dini di Indonesia. Di antaranya perkembangan teknologi dan pergaulan. "Nikah dini sebenarnya hasil dari pola pikir yang kurang rasional. Nikah dini dianggap sebagai jalan keluar dari persoalan hidup dan jalan keluar pergaulan bebas, tetapi kenyataannya justru sebaliknya," papar dosen Fisipol UGM ini.

C. Penolong Persalinan yang Ditangani Tenaga Medis

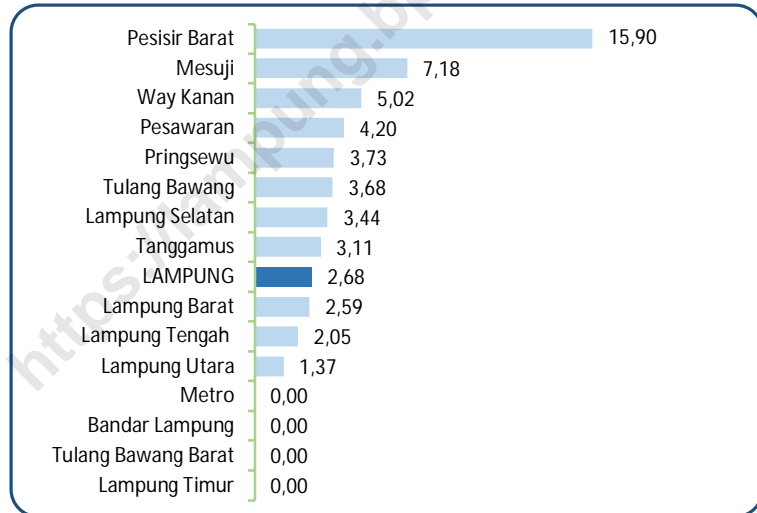
Sebagian besar kematian ibu hamil disebabkan pendarahan saat melahirkan, persalinan macet, sepsis, tekanan darah tinggi, infeksi, dan kejang kehamilan. Sehingga salah satu cara yang paling efektif untuk

menurunkan angka kematian adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih.

Akses ibu hamil dan melahirkan terhadap pelayanan kesehatan modern dapat dilihat dari data Susenas. Proses persalinan di Provinsi Lampung tahun 2020 telah banyak ditangani oleh tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, dan paramedis lainnya. Secara umum penggunaan tenaga bidan cukup dominan membantu persalinan mencapai 67 persen, seperempatnya dibantu dokter, dengan total dibantu tenaga kesehatan mencapai 97,32 persen. Ini menunjukkan capaian pelayanan bidang kesehatan yang mengembirakan dalam proses penanganan ibu hamil.

Gambar 3.4

Persentase Penolong Kelahiran Terakhir yang Ditangani Non Tenaga Medis Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, 2020



Sumber : BPS Provinsi Lampung

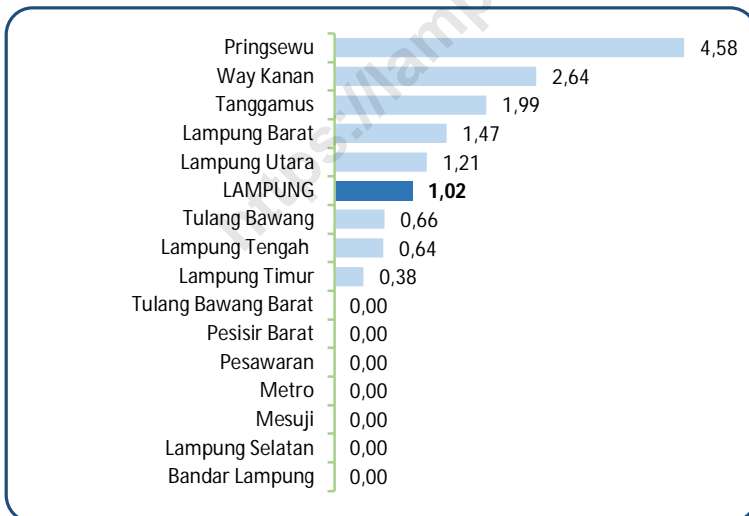
Pada level kabupaten/kota, persalinan dibantu oleh dokter tertinggi adalah Kota Metro, sedangkan yang dibantu bidan terbanyak di Kabupaten Tanggamus. Namun di sisi lain, patut menjadi perhatian adanya persalinan yang masih dibantu non paramedis seperti dukun bersalin, famili/keluarga dan lainnya. Relatif cukup banyak yang masih ditolong dukun bersalin/paraji dengan persentase mencapai 2,68 persen. Hal ini menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengurangi karena tentu saja proses persalinan yang ditolong oleh dukun tidak terjamin kesehatannya secara medis. Penggunaan dukun terbanyak menangani proses kelahiran adalah di Kabupaten Pesisir Barat sebesar 15,90 persen persalinan disusul

Kabupaten Mesuji sebesar 7,18 persen dan Kabupaten Way Kanan sebesar 5,02 persen.

D. Terbatasnya Akses ke Fasilitas Kesehatan

Puskesmas/pustu merupakan fasilitas kesehatan yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat di Provinsi Lampung. Dari data yang tersedia hasil *Updating* Potensi Desa 2019 ada desa yang masih sulit menjangkau puskesmas disebabkan akses jalan menuju puskesmas yang relatif sulit. Di Provinsi Lampung sekitar 1 persen desa atau sebanyak 27 desa beranggapan relatif sulit menjangkau puskesmas yang diukur dari lokasi kantor desa. Kondisi ini cukup banyak ditemui di Kabupaten Pringsewu, di mana sebesar 4,58 persen desa menganggap sulit menjangkau fasilitas tersebut. Disusul oleh Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Tanggamus dengan persentase masing-masing sebesar 2,64 dan 1,99 persen.

Gambar 3.5
Persentase Desa yang Sulit Mengakses Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2019

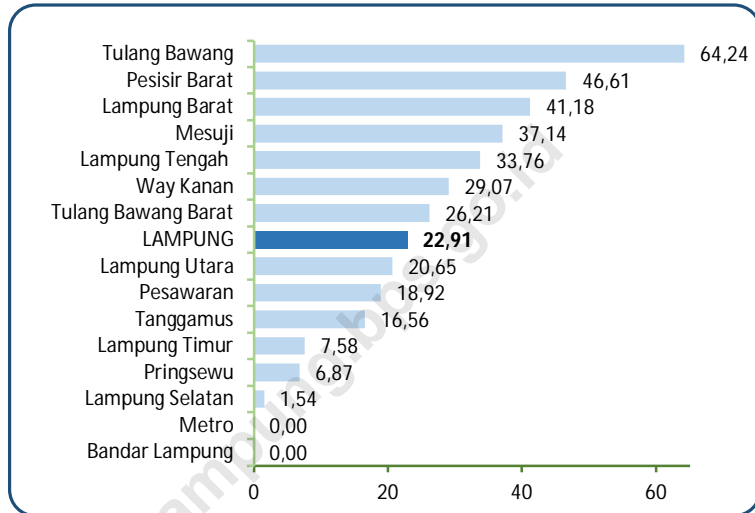


Sumber : *Updating* Pendataan Podes 2019, BPS Provinsi Lampung

Untuk fasilitas kesehatan rumah sakit, beberapa lokasi desa juga masih kesulitan menjangkau fasilitas tersebut. Kondisi ini terutama dirasakan oleh desa di Kabupaten Tulang Bawang dengan persentase desa mencapai lebih dari 64,24 persen. Selanjutnya Kabupaten Pesisir Barat yang mencapai 46,61 persen. Kabupaten Lampung Barat berada pada posisi ketiga berdasarkan kesulitan menjangkau rumah sakit sebesar 41,18 persen. Hal ini karena

keberadaan rumah sakit yang biasanya hanya tersedia di ibu kota kabupaten.

Gambar 3.6
Persentase Desa yang Sulit Menjangkau Rumah Sakit Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Persen), 2019

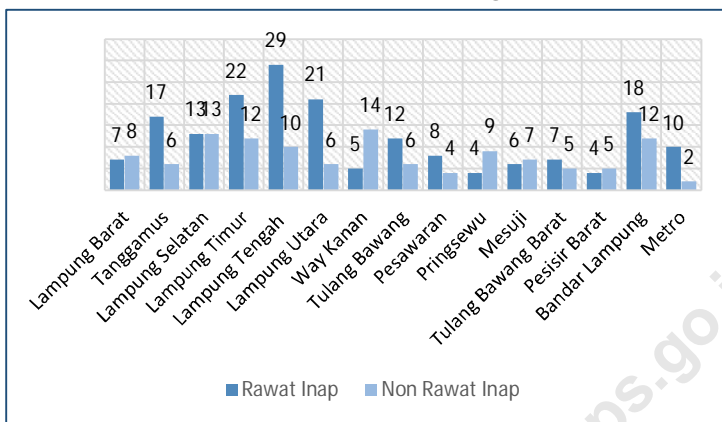


Sumber : *Updating* Pendataan Podes 2019, BPS Provinsi Lampung

E. Tersedianya Sarana/Prasarana Serta Tenaga Kesehatan yang Berkualitas di Rumah Sakit dan Puskesmas

Untuk meningkatkan kemampuan pelayanan, penyelenggaraan puskesmas perlu didorong menjadi puskesmas rawat inap. Dari publikasi Data Dasar Puskesmas kondisi Desember 2018 (Kementerian Kesehatan 2019), terdapat sebanyak 302 puskesmas di Provinsi Lampung. Dari jumlah tersebut, 119 puskesmas telah berstatus puskesmas rawat inap. Puskesmas rawat inap adalah puskesmas yang letaknya strategis dan mudah diakses dari puskesmas di sekitarnya, dapat dijangkau melalui sarana transportasi, yang didirikan sesuai dengan analisa kebutuhan kabupaten/kota. Dilengkapi dengan fasilitas rawat inap, peralatan medis dan kesehatan serta sarana prasarana yang sesuai standar (Kementerian Kesehatan, 2013).

Gambar 3.7
Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Desember 2018



Sumber : Kementerian Kesehatan, 2019

Puskesmas rawat inap tersebut selanjutnya ditingkatkan menjadi Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)². Puskesmas mampu PONED adalah puskesmas rawat inap yang mampu menyelenggarakan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi/komplikasi tingkat dasar dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (Kementerian Kesehatan, 2013).

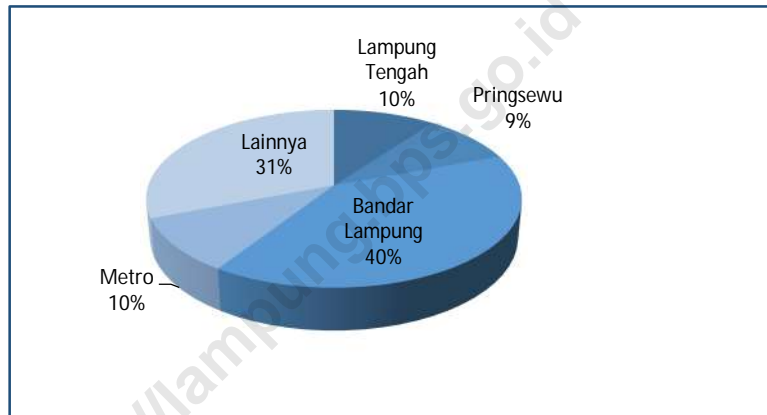
Jarak tempuh dari lokasi pemukiman sasaran, pelayanan dasar dan Puskesmas non PONED ke Puskesmas mampu PONED paling lama 1 jam dengan transportasi umum. Hal ini mengingat waktu paling lama untuk mengatasi pendarahan 2 jam dan jarak tempuh Puskesmas mampu PONED ke rumah sakit minimal 2 jam.

²Menurut The International Federal on of Gynecology Obstetrics (FIGO) terdapat 4 pintu untuk keluar dari kematian ibu yaitu: 1) status perempuan dan kesetaraan gender; 2) Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi; 3) persalinan yang bersih dan aman oleh tenaga yang kompeten; 4) PONED-PONEK.

F. Terbatasnya Dokter Spesialis

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, jumlah dokter spesialis ada sebanyak 603 dokter yang bertugas di rumah sakit se-kabupaten/kota di Provinsi Lampung (Lampung Dalam Angka 2019). Namun persebaran dokter spesialis di kabupaten/kota relatif belum merata.

Gambar 3.8
Persentase Dokter Spesialis di Rumah Sakit
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, Desember 2018



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2019

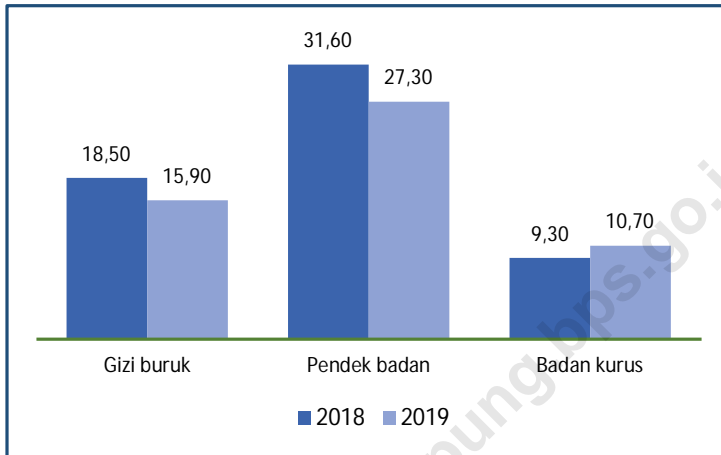
G. Prevalensi Gizi Buruk pada Balita

Angka anak-anak yang menderita kekurangan gizi ternyata masih tinggi bila dibandingkan angka ambang batas yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Kementerian Kesehatan mengungkapkan angka kekurangan gizi itu akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Anak-anak menjadi tidak optimal sekolah dari sejak Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi. Juga rawan terkena penyakit tidak menular yang akan dirasakan saat sudah dewasa.

Bersumber dari Dinas Kesehatan tahun 2019, prevalensi gizi buruk-kurang pada anak balita cukup besar di Provinsi Lampung mendekati prevalensi tinggi, dengan ambang batasnya 10 persen. Persentasenya mencapai 15,90 persen, namun relatif membaik dari tahun sebelumnya. Prevalensi balita pendek mencapai 27,30 persen yang artinya termasuk kategori serius, mengingat ambang batas WHO adalah 20 persen. Sedangkan prevalensi kurus pada anak balita masih 10,70 persen, yang artinya masalah kurus di

Provinsi Lampung masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius karena ambang batas WHO adalah sebesar 5 persen.

Gambar 3.9
**Prevalensi Gizi dan Postur Badan Balita
Provinsi Lampung, 2018-2019**



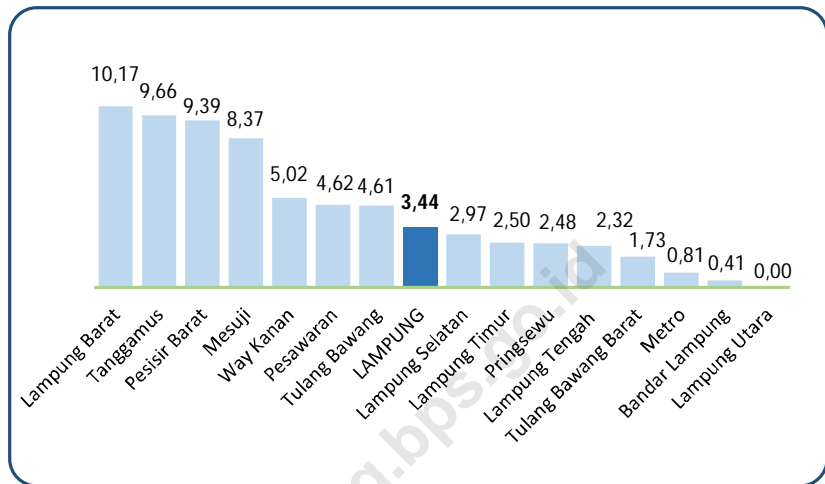
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2019

H. Kondisi Rumah Berlantai Tanah

Lantai rumah dapat mempengaruhi terjadinya penyakit ISPA karena lantai yang tidak memenuhi standar merupakan media yang baik untuk perkembangbiakan bakteri atau virus penyebab ISPA. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanto dkk (2000) bahwa jenis lantai setengah plester dan tanah akan banyak mempengaruhi kelembaban rumah, kondisi rumah yang lembab dan susah dibersihkan merupakan tempat berkembang biak mikroorganisme patogen termasuk kuman ISPA.

Bersumber data Susenas 2020, masih cukup banyak rumah tangga yang jenis lantai rumahnya masih tanah meski ada sedikit penurunan dari tahun 2019 yang sebesar 4,18 persen, kini tahun 2020 masih ada sebanyak 3,44 persen rumah tangga yang tersebar di kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Persentase rumah berlantai tanah tertinggi terdapat di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Pesisir Barat di atas 9 persen. Sementara di daerah perkotaan, kondisi jenis lantai utama rumah dominan sudah berupa keramik, semen ataupun bata merah. Bahkan di Kabupaten Lampung Utara rumah yang luas lantai utamanya adalah tanah relatif sudah tidak ada.

Gambar 3.10
Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Tanah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020



Sumber : BPS Provinsi Lampung, Susenas

I. Akses terhadap Air Minum Bersih

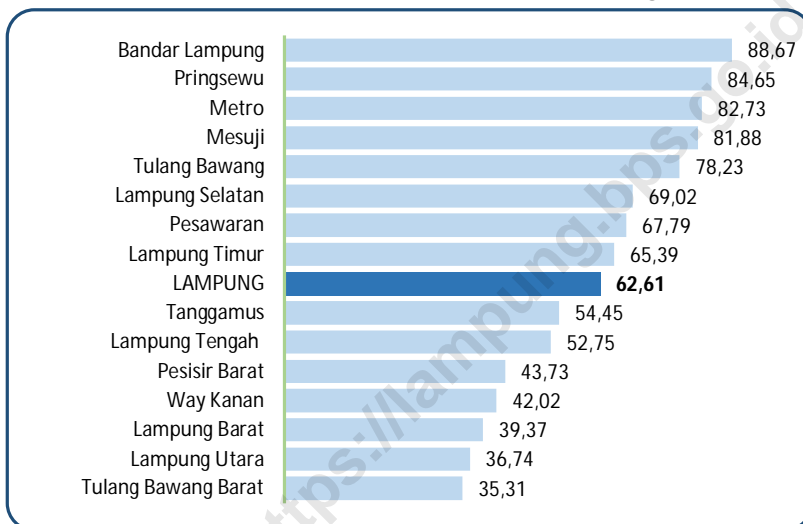
Data Susenas menunjukkan besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih di Provinsi Lampung pada tahun 2020 mencapai 62,61 persen. Kondisi yang cukup menggembirakan mengingat persentase rumah tangga pengguna air bersih relatif ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Bagi pemerintah hal ini baik menjadi masukan, karena berarti masih ada 38 persen rumah tangga lain yang belum dapat mengakses air bersih.

Kondisi kabupaten/kota cukup heterogen. Di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro serta Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji, penggunaan air bersih untuk aktivitas sehari-hari sudah tergolong baik. Data hasil Susenas menunjukkan lebih dari 81 persen rumah tangga sudah menggunakan air bersih untuk aktivitas sehari-hari. Gaya hidup penduduk perkotaan dalam mengkonsumsi air cukup jauh berbeda dengan gaya hidup penduduk yang tinggal di perdesaan. Seperti yang ditemui di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Lampung Barat, di mana persentase rumah tangga pengguna air bersih masih minim kurang dari 40 persen. Hal ini dikondisikan dengan banyaknya rumah tangga yang menggunakan sumber air yang beresiko terjadi pencemaran seperti sumur tak terlindung, serta mata air terlindung dan tak terlindung. Sebanyak 50 hingga 60 persen air

minum utamanya diambil dari sumber air tersebut. Ditambah lagi dengan efek tempat pembuangan akhir tinja yang juga berperan mempengaruhi kebersihan sumber air masyarakat. Di ketiga kabupaten tersebut mayoritas rumah tangganya masih membuang kotoran akhir tinja di lubang tanah. Akibatnya kualitas air yang digunakan rumah tangga menjadi tidak bersih dan menjadi kurang layak digunakan.

Gambar 3.11

**Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Bersih¹⁾
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020**



Sumber : BPS Provinsi Lampung, Susenas

Catatan :

¹⁾ Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tangki septik \geq 10 meter.

BAB

4

**Tantangan Utama dalam
Pencapaian Sasaran Pendidikan**

Tantangan Utama dalam Pencapaian Sasaran Pendidikan

Sejarah mencatat bahwa ketersediaan SDM yang terdidik merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan negara-negara maju. Pendidikan menjadi sebuah tolok ukur suatu daerah dalam menciptakan SDM yang mampu bersaing secara global. Karena itu, tidaklah mengherankan hampir semua negara menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional mereka (Syamsudin, 2009). Sejumlah sumber menyebutkan Finlandia sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia sejak tahun 2000.

Pendidikan dan sosial budaya sangat berkaitan erat di mana sistem sosial budaya menjadi bagian dari sistem pendidikan itu sendiri sehingga permasalahan pendidikan menjadi sangat kompleks. Misalnya masalah mutu pendidikan dan manusia yang ada tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat di sekitarnya, dari mana murid tersebut berasal, serta masih banyak faktor-faktor lainnya. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka untuk menjawab tantangan dunia pendidikan juga menjadi sangat kompleks, menyangkut banyak komponen, serta melibatkan banyak pihak yang terkait agar masalah pendidikan tersebut dapat terselesaikan dengan efektif dan efisien. Dalam upaya mewujudkan manusia berkualitas, dunia pendidikan menghadapi berbagai tantangan yang meliputi aksesibilitas infrastruktur dan fasilitas pendidikan, ekonomi rumah tangga, kualitas pendidikan, terbatasnya sekolah kejuruan, dan lain lain.

Desakan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut makin dirasakan setelah bangsa Indonesia mengikatkan diri melalui komitmen *Sustainable Development Goals* (SDGs). Berbeda dengan MDGs, program SDGs menaruh perhatian bukan hanya pada pengembangan manusia (*human development*) tapi juga pengembangan ekonomi dan lingkungan sebagai bagian dari agendanya. *Sustainable Development Goals* bertujuan

memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.

Pasal 31 UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya. Negara juga memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Menurut Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur secara sistematis. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan sehat.

Selanjutnya akan dibahas tentang pembangunan pendidikan di Provinsi Lampung khususnya dalam konteks kontribusinya terhadap capaian pembangunan manusia sebagaimana diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Analisis akan disajikan untuk menjelaskan perannya dalam mempengaruhi IPM, tetapi dalam konteks pembangunan secara umum. Indikator yang digunakan merupakan alat ukur yang menunjukkan status pembangunan pendidikan yaitu angka partisipasi sekolah (APS), angka putus sekolah, pembiayaan pendidikan, sarana, tenaga pendidikan, dan lainnya. Telaah yang lebih luas ini diharapkan dapat memberi manfaat lebih jauh, khususnya dalam kaitan kepentingan perencanaan pembangunan dibidang pendidikan dan sumber daya manusia pada umumnya. Memperluas akses ke pendidikan menengah tidak hanya berpengaruh terhadap tekanan sosial, tetapi ekonomi manusia yang berpendidikan juga akan berpeluang besar mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak.

4.1. Perkembangan Pencapaian Partisipasi Pendidikan Dasar

Pemerintah mempunyai program Wajib Belajar 9 tahun. Program ini didasari konsep “pendidikan dasar untuk semua” (*universal basic education*) yang pada hakikatnya berarti penyediaan akses yang sama untuk semua anak. Hal ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang tercantum dalam Piagam

PBB tentang Hak Asasi Manusia, tentang Hak Anak, dan tentang Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak (Prayitno, 2000). Melalui program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun diharapkan dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang perlu dimiliki semua warga negara sebagai bekal untuk dapat hidup dengan layak di masyarakat serta dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi baik ke lembaga pendidikan sekolah ataupun luar sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Kelompok umur yang dipakai untuk melihat angka partisipasi sekolah adalah kelompok umur yang ditujukan untuk program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar, yaitu umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Indikator lainnya adalah Angka Partisipasi Murni (APM) yang menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah berpartisipasi dalam pendidikan pada jenjang yang sesuai dengan umurnya.

Pada Tabel 4.1 terlihat capaian angka partisipasi sekolah pada kelompok umur SD dan SMP relatif sudah baik. APS kelompok umur 7–12 tahun mencapai 99,74 persen dan APS 13–15 sebesar 95,24 persen. Sedangkan pada jenjang SMA dan sederajat usia 16–18 tahun, angka partisipasi sekolah hanya sebesar 71,34 persen, yang berarti masih ada 28,66 persen yang belum sekolah atau sudah bersekolah namun berhenti mengenyam pendidikan tingkat SMA.

Tabel 4.1
APS dan APM di Provinsi Lampung, 2018–2020

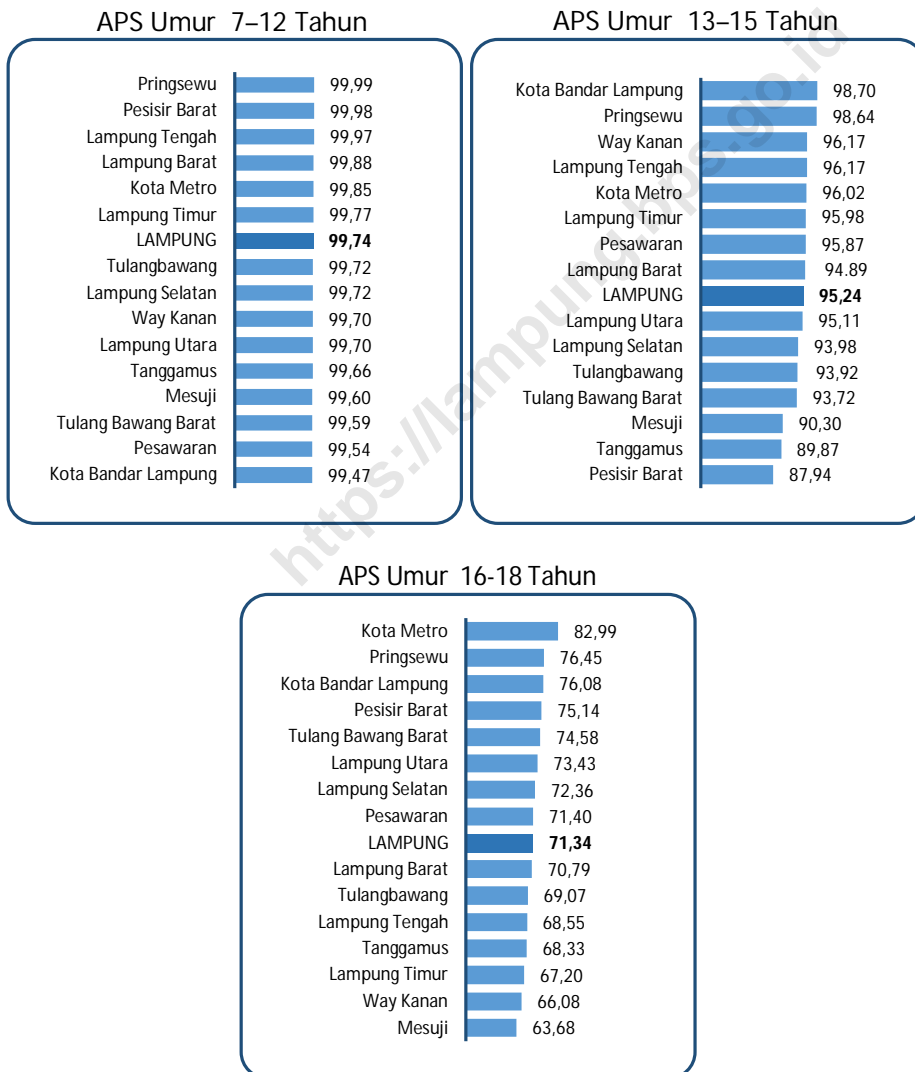
Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Partisipasi Sekolah			
SD	99,86	99,80	99,74
SLTP	95,00	94,89	95,24
SLTA	70,83	71,05	71,34
Angka Partisipasi Murni			
SD	99,21	99,24	99,16
SLTP	80,23	80,40	81,17
SLTA	59,18	59,41	59,58

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Angka partisipasi murni (APM) SD mencapai 99 persen, yang berarti dari 100 penduduk usia 7–12 tahun ada sekitar 99 orang yang bersekolah di bangku SD/sederajat. Pada jenjang yang lebih tinggi, sekitar 81 orang dari

100 penduduk usia 13–15 tahun menerima pendidikan di bangku SLTP/ sederajat, dan sekitar 59 orang dari 100 penduduk usia 16–18 tahun mendapatkan pendidikan di bangku SLTA/ sederajat. Pola di atas menunjukkan bahwa APS dan APM di Provinsi Lampung semakin menurun pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi.

Gambar 4.1
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Persen), 2020



Sumber : BPS Provinsi Lampung

Pada jenjang sekolah dasar usia 7–12 tahun, partisipasi sekolah di semua wilayah Provinsi Lampung hampir merata lebih dari 99 persen, dengan APS hampir mencapai 100 persen berada di Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Tengah. Pada jenjang SMP atau umur 13–15 tahun, APS sekolah juga relatif tinggi dan merata di seluruh wilayah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, kecuali Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat kurang dari 90 persen.

Seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan, APS cenderung menurun. Pada jenjang SMA/ sederajat ke atas misalnya, APS kabupaten/kota berkisar antara 63–83 persen. Persentase APS terendah adalah Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Way Kanan. Sedangkan di daerah kota, APS relatif lebih tinggi di Kota Metro mencapai hampir 83 persen sementara di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pringsewu hampir 76 persen.

4.2 Tantangan Pembangunan Manusia Dimensi Pendidikan

Banyak hal yang menjadi penyebab atau mempengaruhi anak berhenti sekolah khususnya pada umur 16-18 tahun di Provinsi Lampung. Oleh karena itu dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan pendidikan khususnya kasus anak berhenti sekolah ini, kita harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil pengamatan eksplorasi data, dapat teridentifikasi beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Provinsi Lampung. Antara lain ketidakmampuan ekonomi rumah tangga, aksesibilitas sarana pendidikan, pendidikan orang tua, kualitas guru, dan lainnya.

Akses ke fasilitas sekolah akan menjadi faktor penghambat bagi siswa, jika jarak yang ditempuh terlalu jauh. Dari data Updating Podes 2019 ditunjukkan bahwa keberadaan SD di Provinsi Lampung sudah relatif merata dan terjangkau oleh masyarakat, di mana lebih 99 persen desa di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung sudah memiliki akses mudah.

Tabel 4.2
**Persentase Desa Menurut Jarak ke Fasilitas Pendidikan di
 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, 2019**

Kabupaten/Kota	Jarak SD terdekat > 10 km	Jarak SMP terdekat > 10 km	Jarak SLTA terdekat > 10 km
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	0,74	27,94	19,12
Tanggamus	0,33	23,18	14,57
Lampung Selatan	0,00	10,77	9,23
Lampung Timur	0,00	15,15	7,95
Lampung Tengah	0,32	18,15	10,19
Lampung Utara	0,81	28,34	21,86
Way Kanan	0,88	38,33	27,75
Tulang Bawang	1,32	25,17	23,18
Pesawaran	0,00	8,11	7,43
Pringsewu	0,76	15,27	10,69
Mesuji	0,00	21,90	16,19
Tulang Bawang Barat	0,00	18,45	15,53
Pesisir Barat	0,85	21,19	33,05
Kota Bandar Lampung	0,79	1,59	0,00
Kota Metro	0,00	0,00	0,00
LAMPUNG	0,45	19,93	14,92

Sumber : BPS Provinsi Lampung, *Updating* Potensi Desa 2019

Berbeda dengan akses fasilitas pendidikan yang lebih tinggi yang masih sulit terjangkau di beberapa wilayah. Pada jenjang SMP/ sederajat masih cukup banyak desa yang jaraknya jauh lebih dari 10 km yaitu lebih dari 19 persen desa. Akses yang jauh tersebut terutama ditemui di Kabupaten Way Kanan dengan persentase mencapai 38,33 persen. Begitu pula pada tingkat SMA/ sederajat keberadaan sekolah lebih semakin terbatas jumlahnya sehingga keterjangkauan masyarakat untuk mengakses pelayanan juga menjadi terbatas. Pada jenjang SMA/ sederajat persentase desa di Provinsi Lampung dengan keberadaan sekolah lebih dari 10 Km dari kantor desa sebanyak 14,92 persen. Desa- desa tersebut utamanya berada di Kabupaten Pesisir Barat sebesar 33,05 persen. Diikuti oleh Kabupaten Way Kanan sebesar 27,75 persen. Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Utara berada pada posisi ketiga dan keempat masing- masing sebesar 23,18 persen dan 21,86 persen.

BAB

5

**Tantangan Pembangunan
Manusia Bidang Ekonomi**

Tantangan Pembangunan Manusia Bidang Ekonomi

Negara-negara Asia termasuk Indonesia menghadapi berbagai tantangan besar perekonomian di masa depan. Tantangan-tantangan itu diantaranya adalah jebakan pendapatan kelas menengah, situasi tata kelola dan institusi ekonomi, orang berusia lanjut (*population aging*) semakin banyak, ketimpangan pendapatan terus tinggi, dan pengembangan sektor keuangan. “Jika mampu atasi ini, ekonomi Asia akan cemerlang,” demikian disampaikan Direktur IMF Asia, Chang Yong Rhee.

Selain itu, tantangan lain untuk Indonesia adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku sejak 1 Januari 2016. Melalui MEA akan terjadi integrasi sektor ekonomi yang meliputi *free trade area*, penghilangan tarif perdagangan antarnegara ASEAN, pasar tenaga kerja dan modal yang besar, pertumbuhan konsumsi, dan iklim investasi yang makin baik.

Menurut hasil kajian Pusat Kebijakan Regional Bilateral Departemen Keuangan pada tahun 2014, dijelaskan bahwa dengan hadirnya ajang MEA ini, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan baik eksternal maupun internal. Tantangan eksternal yang dihadapi antara lain adalah tingkat persaingan perdagangan yang semakin ketat, semakin besarnya defisit neraca perdagangan Indonesia dengan negara ASEAN lainnya, dan bagaimana Indonesia dapat meningkatkan daya tarik investasi. Sementara itu, tantangan internal Indonesia antara lain adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap MEA, ketidaksiapan daerah menghadapi MEA, tingkat pembangunan daerah yang masih sangat bervariasi, serta kondisi SDM dan ketenagakerjaan.

Tentu saja kita harus berusaha untuk terus meningkatkan daya saing melalui pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi di tahun-tahun mendatang agar Indonesia khususnya Provinsi Lampung memperoleh manfaat besar dari integrasi ekonomi Asia Tenggara. Dari aspek ketenagakerjaan terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk

pergi ke luar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu.

Hal ini tentu sejalan dengan salah satu tujuan SDGs yaitu mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua. Beberapa hasil penelitian mengungkapkan modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dalam paradigma pembangunan manusia, pendapatan menjadi suatu alat untuk menguasai sumber daya agar dapat terwujud suatu kehidupan yang layak.

Pertumbuhan yang pro kemiskinan merupakan cara untuk dapat menghasilkan output yang signifikan antara pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak.

Gambar 5.1.
Tiga Dimensi dan Tujuan ke-8 SDGs



Menurut International Labour Organization (ILO), penempatan ekonomi ke jalur pertumbuhan yang berkelanjutan dan cepat diperlukan guna memastikan kesempatan kerja produktif untuk semua dan pengurangan kemiskinan. Hal ini akan memerlukan intensifikasi dan peningkatan pertanian yang berorientasi pada pasar. Diversifikasi ekonomi dengan prioritas diberikan untuk mengembangkan hubungan ke dan dari sektor pertanian, rantai nilai tambah domestik yang kuat dan manufaktur modern.

Juga agar intensifikasi dan pengembangan pasar ekspor mencapai pertumbuhan yang adil, pembangunan ekonomi harus bersifat inklusif (meluas dan merata) meliputi seluruh tingkat pendapatan, antarwilayah maupun antargender dan pro rakyat miskin.

Sebagai salah satu unsur penentu angka indeks pembangunan manusia (IPM), komponen daya beli memegang peranan penting dalam proses pembangunan ekonomi karena menyangkut kemampuan masyarakat secara keseluruhan untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkannya. Gambaran daya beli masyarakat di suatu wilayah dapat menjadi sinyal utama sejauh mana keberhasilan pembangunan ekonomi karena rendahnya daya beli identik dengan tingginya kemiskinan dan pengangguran.

Terdapat dua faktor penentu daya beli masyarakat yakni pendapatan dan inflasi. Pertama terkait dengan kemampuan menghasilkan pendapatan dan kedua menyangkut kinerja makro ekonomi aspek stabilitas harga. Ketika harga-harga barang secara umum mengalami kenaikan, maka kemampuan mendapatkan barang-barang akan menurun jika besarnya pendapatan tetap. Agar daya beli tetap maka harus terjadi kenaikan pendapatan yang melebihi besarnya tingkat inflasi. Kondisi yang lebih baik adalah pendapatan terus meningkat di satu sisi dan terjadi stabilitas harga.

Upaya-upaya ekonomi yang bisa difokuskan adalah peningkatan akses masyarakat miskin terhadap sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan kelompok miskin.

5.1. Potret Kemiskinan di Provinsi Lampung

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di mana pun. Mayoritas masyarakat miskin merupakan kalangan yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu selain membutuhkan bantuan pemberdayaan, masyarakat miskin juga membutuhkan akses kepada sumber permodalan usaha. Dalam kaitan ini, lembaga keuangan yang ada di Indonesia yang diakui oleh peraturan yang ada adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), koperasi simpan pinjam, koperasi kredit (*credit union*), dan kredit mikro yang dilayani oleh bank-bank besar yang membuka layanan kredit mikro.

Dengan kata lain, mengupayakan pembiayaan bagi usaha mikro akan bermuara pada penanggulangan kemiskinan. Pendanaan bagi usaha mikro merupakan salah satu aspek yang menjadi substansi regulasi dan kebijakan dalam menumbuhkan iklim usaha. Inilah yang diupayakan pemerintah pusat dan daerah untuk memberdayakan usaha mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi. Seluruhnya bertujuan agar usaha mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Sejak Inpres Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM, hingga lahirnya UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM telah memberikan landasan yang kokoh bagi keberadaan usaha mikro.

Strategi penanggulangan kemiskinan di perdesaan harus dikaitkan dengan peningkatan usaha ekonomi produktif dan perbaikan infrastruktur pertanian di perdesaan. Adanya pembinaan usaha tani padat modal yang digalang oleh suatu koperasi nasional di bawah pengelolaan negara diharapkan dapat memperbaiki sistem kelembagaan sehingga akan menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Keberadaan usaha mikro merupakan fakta semangat jiwa kewirausahaan sejati di kalangan rakyat yang bisa menjadi perintis pembaharuan. Menyadari realitas ini, memfokuskan pengembangan ekonomi rakyat terutama pada usaha mikro merupakan hal yang sangat strategis.

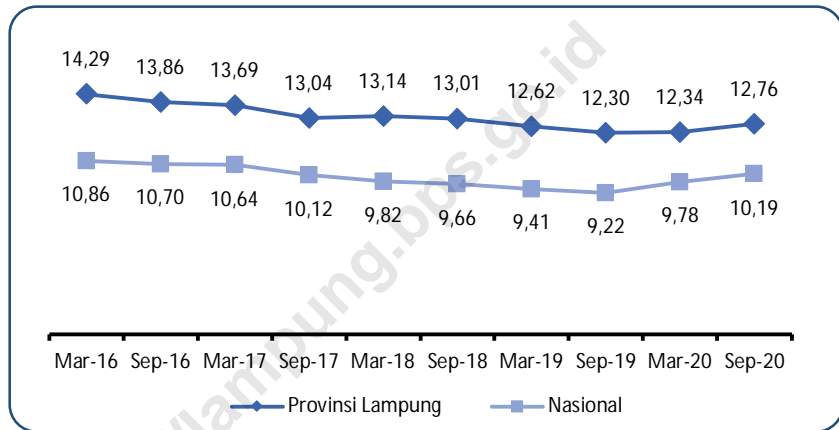
Sejalan dengan terus meningkatnya harga kebutuhan pokok masyarakat, garis kemiskinan juga cenderung naik. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai batas bagi penentuan status penduduk apakah tergolong miskin atau tidak. Penduduk dikatakan miskin jika nilai pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Makin tinggi garis kemiskinan maka akan semakin banyak penduduk miskin jika tidak diikuti oleh peningkatan pendapatan.

Kondisi terakhir bulan September 2020, garis kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0,83 persen dari Rp453.733,00 pada bulan Maret 2020 naik menjadi Rp457.495,00 per kapita per bulan pada September 2020. Sedangkan jika dibandingkan terhadap bulan yang sama tahun sebelumnya telah terjadi kenaikan garis kemiskinan sebesar 5,25 persen yaitu dari Rp434.675,00 per kapita per bulan pada September 2019.

Kenaikan harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan dasar penduduk berdampak pada kenaikan angka kemiskinan Provinsi Lampung. Tingkat kemiskinan baik secara jumlah maupun secara persentase menunjukkan kenaikan. Jumlah penduduk miskin pada September 2020 mencapai 1,09

juta orang, persentasenya sebesar 12,76 persen dari total penduduk. Artinya terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 41,82 ribu orang atau bertambah 0,42 persen dibanding Maret 2020. Tingkat kemiskinan pada September 2020 menunjukkan peningkatan dibanding periode waktu yang sama tahun 2019 yang sebesar 12,30 persen.

Gambar 5.2.
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung dan Nasional, 2016-2020



Sumber : BPS RI dan BPS Provinsi Lampung

Gambar 5.2 menunjukkan keterbandingan persentase penduduk miskin Provinsi Lampung dengan nasional. Persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung masih berada di atas angka kemiskinan nasional. Pada September 2020 persentase penduduk miskin Provinsi Lampung meningkat sejalan dengan tren perkembangan kemiskinan pada tingkat nasional. Penambahan penduduk miskin Provinsi Lampung pada periode terakhir relatif lebih tinggi yang terlihat dari semakin melebarnya *gap* antara persentase penduduk miskin provinsi terhadap angka nasional.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, keberadaan penduduk miskin lebih terkonsentrasi di daerah perdesaan. Pada periode Maret 2020-September 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sebanyak 22,18 ribu orang. Persentase penduduk miskin meningkat dari sebelumnya sebesar 9,02 persen, kini pada September 2020 menjadi 9,59 persen. Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2020 juga meningkat. Terjadi penambahan penduduk miskin sebanyak 19,64 ribu penduduk dengan persentase sebesar 13,83 persen pada Maret 2020, naik menjadi sebesar 14,22 persen pada September 2020.

Tabel 5.1.

**Jumlah Penduduk Miskin, Persentase dan Garis Kemiskinan di
Provinsi Lampung, 2016-2020**

Tahun	Penduduk Miskin (Ribu)			Kemiskinan (%)			Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota+ Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mar 2016	233,39	936,21	1.169,60	10,53	15,69	14,29	364.922
Sept 2016	227,44	912,34	1.139,78	10,15	15,24	13,86	368.592
Mar 2017	228,32	903,41	1.131,73	10,03	15,08	13,69	384.882
Sept 2017	211,97	871,77	1.083,74	9,13	14,56	13,04	390.183
Mar 2018	228,82	868,22	1.097,05	9,27	14,76	13,14	402.307
Sept 2018	230,20	861,40	1.091,60	9,06	14,73	13,01	409.881
Mar 2019	231,86	831,80	1.063,66	8,92	14,27	12,62	418.309
Sept 2019	224,69	816,79	1.041,48	8,60	13,96	12,30	434.675
Mar 2020	237,10	812,22	1.049,32	9,02	13,83	12,34	453.733
Sept 2020	259,28	831,86	1.091,14	9,59	14,22	12,76	457.495

Sumber : BPS Provinsi Lampung

5.2. Karakteristik Defisiensi Lapangan Kerja Produktif dan Pekerjaan yang Layak

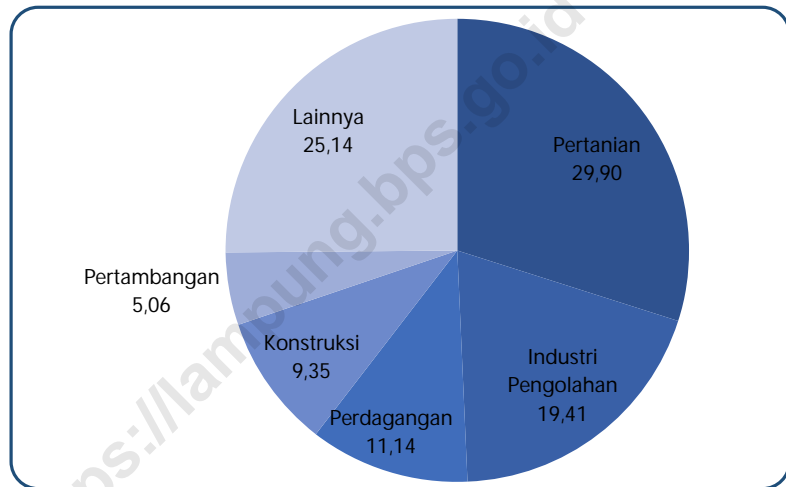
Para pekerja miskin dapat dikategorikan lebih jauh menurut penyebab dan bentuk manifestasinya yang paling mendekati dan dari hasil imbal balik pada tenaga kerja yang tidak mencukupi. Menurut ILO definisi tersebut terdiri dari setengah pengangguran (*under employment*), setengah pengangguran terbuka, dan setengah pengangguran terselubung. Rendahnya imbal balik ke tenaga kerja (*low returns to labour*) yaitu mereka yang bekerja dengan penghasilan rendah, mereka yang bekerja dengan keahlian minim, teknologi minim dan/atau faktor-faktor pelengkap yang tidak mencukupi, dan mereka yang menderita akibat buruknya nilai tukar dagang karena harga produk yang rendah atau pun biaya input yang tinggi, atau dua-duanya.

5.2.1 Turunnya Dominasi Sektor Pertanian

Ekonomi Provinsi Lampung didominasi oleh sektor pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dan sektor jasa yang sedang tumbuh berkembang di saat sektor publik memainkan peranan penting. Sementara peran dari sektor manufaktur dalam ekonomi relatif menguat.

Kontribusi sektor pertanian terhadap perkembangan ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2020 cukup besar yaitu 29,90 persen dibandingkan dengan peranan pertanian secara nasional yang hanya sebesar 13,70 persen. Kategori industri pengolahan berada pada posisi kedua yaitu mencapai 19,41 persen dan kategori perdagangan dan konstruksi sebagai penyumbang terbesar ketiga dan keempat masing-masing mencapai 11,14 persen dan 9,35 persen.

Gambar 5.3
Kontribusi Sektor Dominan PDRB Provinsi Lampung (%), 2020



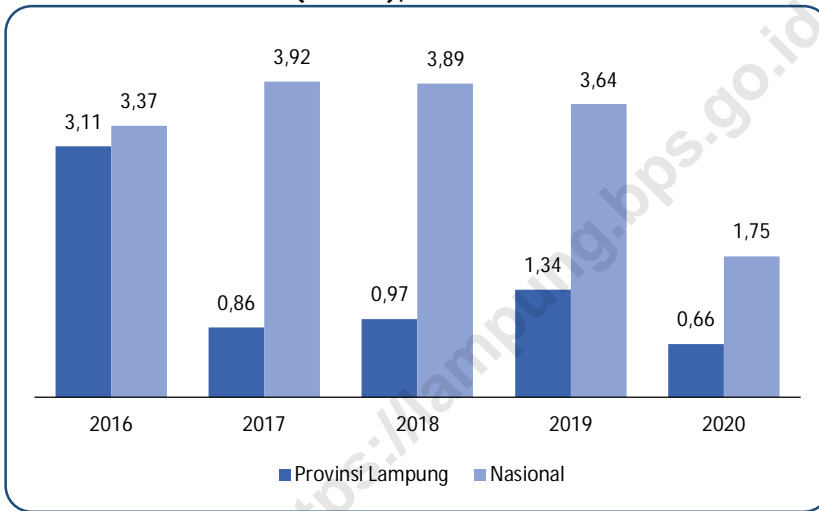
Sumber : BPS Provinsi Lampung

Pada tahun 2020 kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 0,66 persen, melemah dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh mencapai 1,34 persen. Laju pertumbuhan ini pun lebih rendah jika dibanding pertumbuhan secara nasional yang tumbuh sebesar 1,75 persen. Dampaknya, sumber pertumbuhan kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap total pertumbuhan tahun 2020 pun menurun menjadi sebesar 0,18 persen. Sumbangan kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap pertumbuhan Provinsi Lampung melemah sejalan dengan penurunan sumbangan pertumbuhan sektor tersebut di lingkup nasional.

Surya Ayomi (2014) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian tidak mampu menekan jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Dengan demikian mengingat perannya cukup besar dalam penciptaan nilai tambah ekonomi Provinsi Lampung, perlu upaya lebih dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di daerah dengan

adanya rangsangan ekonomi berupa terjangkaunya harga sarana produksi, harga jual yang baik, serta penggunaan teknologi dan sasaran penanganan pasca panen. Selain bertumpu pada rangsangan ekonomi, adanya perbaikan saluran tersier dan peningkatan subsidi input pertanian oleh pemerintah akan dapat secara efektif menjangkau kebutuhan khususnya sektor pertanian.

Gambar 5.4
Pertumbuhan Sektor Pertanian Provinsi Lampung dan Indonesia (Persen), 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Lampung

5.2.2 Masih Rendahnya Tingkat Upah Buruh

Selanjutnya tinggi rendahnya upah buruh sangat menentukan kesejahteraan buruh. Semakin tinggi upah yang diterima semakin tinggi tingkat kesejahteraan buruh. Upah buruh yang rendah cenderung menunjukkan ketidakmampuan untuk bersaing dan menghambat tercapainya kesejahteraan bagi rakyat. Upah yang tinggi membuat daya beli masyarakat meningkat yang dapat mendorong tumbuhnya perekonomian. Sementara inflasi menyebabkan turunnya daya beli masyarakat sehingga menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat upah buruh dari tahun ke tahun terus meningkat. Nilai rata-rata kenaikan upah buruh tiap tahun lebih besar dibanding dengan nilai inflasi.

Tabel 5.2
**Perbandingan Upah Minimum Regional/Provinsi Se-Sumatera
 (Rupiah), 2016-2020**

Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	2.118.500	2.500.000	2.717.750	2.916.810	3.165.030
Sumatra Utara	1.811.875	1.961.354	2.132.188	2.303.403	2.499.422
Sumatra Barat	1.800.725	1.949.284	2.119.067	2.289.228	2.484.041
Riau	2.095.000	2.266.722	2.464.154	2.662.025	2.888.563
Jambi	1.906.650	2.063.000	2.243.718	2.423.889	2.630.161
Sumatra Selatan	2.206.000	2.388.000	2.595.995	2.804.453	3.043.111
Bengkulu	1.605.000	1.737.412	1.888.741	2.040.000	2.213.604
Lampung	1.763.000	1.908.447	2.074.673	2.240.646	2.431.324
Kep. Babel	2.341.500	2.538.673	2.755.443	2.976.705	3.230.022
Kep. Riau	2.178.710	2.358.454	2.563.875	2.769.683	3.005.383

Sumber : BPS RI dan BPS Provinsi Lampung

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain meningkatkan gaji pegawai pemerintah juga menekan laju inflasi. Pengaruh inflasi terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dieliminasi apabila kenaikan gaji pegawai lebih besar dari inflasi. Dengan kenaikan upah buruh yang lebih besar dari inflasi menunjukkan bahwa kesejahteraan buruh meningkat, walau peningkatannya tidak sebesar kenaikan upah yang diterima karena harus dikurangi dengan besarnya inflasi.

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan salah satu ukuran daya beli masyarakat. Makin tinggi UMP merefleksikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Selama tahun 2016-2020, UMP Provinsi Lampung mengalami peningkatan 8 persen rata-rata setiap tahunnya. Pada tahun 2020 UMP naik dari sebelumnya 2,24 juta rupiah menjadi 2,43 juta rupiah. Namun dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, tingkat UMR Provinsi Lampung relatif masih rendah.

5.2.3 Masih Besarnya Kontribusi Tenaga Kerja Sektor Informal

Mengutip perkataan Mahbub UI Haq (1970) *"Let us take care of employment, employment will take care of growth"*. Dalam dua dasawarsa terakhir, terjadi pengembangan penelitian dalam modal manusia. Salah satunya adalah Barro (1991) yang menemukan bukti bahwa pertumbuhan ekonomi negara tidak dapat dijelaskan baik oleh modal fisik maupun input tenaga kerja, dan tekanan yang dilakukan untuk dapat menjelaskan anomali tersebut. Pada saat yang bersamaan munculnya *Endogenous Growth Theory* (Romer, 1986) yang memberikan alat yang sesuai bagi para ahli untuk

menyelidiki hal itu. Usaha mula-mula yang nampak pada literatur mengutamakan pada investasi modal manusia. Penelitian ini masih tetap populer sampai saat ini. Para peneliti memasukan lamanya sekolah dan tingkat melek huruf. Modifikasi terbaru model memasukan iterasi partisipasi sekolah dan putus sekolah ke dalam model.

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam meningkatkan perekonomian. Tepat sekali sebuah ungkapan berikut ini "Manusia bukan sebagai alat pembangunan tetapi tujuan akhir pembangunan". BPS, Bappenas dan UNDP pada tahun 2004 membahas komposisi tenaga kerja menurut pendidikan dan usia, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pengangguran dan setengah pengangguran, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) serta pekerja formal dan informal. Apakah tenaga kerja Provinsi Lampung dapat bersaing dalam MEA? Apakah dapat memanfaatkan peluang bonus demografi? Suatu potensi (*window of opportunity*) akan menjadi bencana (*window disaster*) apabila kualitas yang dimiliki oleh penduduk kelompok usia produktif tersebut tidak memadai. Potensi tersebut justru dapat menjadi bencana akibat terjadi "ledakan pengangguran" usia produktif. Setelah tahun 2030, Indonesia kemudian akan menghadapi peningkatan pesat pada kelompok penduduk usia lanjut 65 tahun ke atas.

Pada momen *windows of opportunity* inilah keuntungan ekonomis diperoleh. Suplai tenaga kerja yang besar meningkatkan pendapatan per kapita. Penurunan proporsi penduduk usia anak-anak juga bakal mengurangi besarnya biaya untuk pemenuhan kebutuhannya, karena dapat dialihkan kegunaannya untuk menyimpan uang dan berinvestasi berupa tabungan, pendidikan berkualitas, kursus, asuransi kesehatan, asuransi hari tua, saham dan pengembangan bisnis lain. Dan peranan perempuan dengan jumlah anak sedikit memungkinkan perempuan memasuki pasar kerja dan akan membantu peningkatan pendapatan.

Untuk menjadikan pertumbuhan penduduk usia muda sebagai jendela pembuka peluang, penduduk perlu mendapatkan pendidikan yang memadai, kualitas pekerja lebih ditingkatkan, dan penyediaan lapangan kerja yang optimal. Menurut Moertiningsih (2005), fenomena kependudukan ini akan optimal jika tersedia tenaga kerja berkualitas, tabungan tinggi, meningkatnya partisipasi perempuan, serta menekan pengangguran rendah secara produktif.

Gambar 5.5
Konsep *Windows of Opportunity*



Fenomena tersebut disebabkan komponen pengangguran terbuka yang didominasi oleh para pencari kerja tidak lagi tertarik untuk masuk di sektor pertanian. Banyak sebab yang melatarbelakangi minimnya minat kerja di sektor ini diantaranya karena pertanian di wilayah ini masih menggunakan teknologi tradisional sehingga memperlambat laju pertumbuhan outputnya. Menurut Sukirno (2002) negara berkembang dimana setengah dari penduduknya berada di sektor pertanian justru berpotensi terdapat masalah pengangguran tersembunyi. Cara bercocok tanam yang masih tradisional, penggunaan input pertanian yang masih sederhana, kurangnya infrastruktur pertanian menyebabkan produktivitas sektor tersebut masih rendah dan masalah kemiskinan yang meluas.

Tabel 5.3
Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, Agustus 2019-2020

Uraian	Agustus 2019		Agustus 2020		Perubahan	
	Absolut (000)	%	Absolut (000)	%	Absolut (000)	%
Angkatan Kerja (TPAK)	4.361,85	69,06	4.489,68	70,16	127,82	1,58
Laki-laki	2.795,19	86,24	2.800,36	85,41	5,16	-0,97
Perempuan	1.566,66	50,95	1.689,32	54,13	122,66	6,24
Pengangguran Terbuka	175,66	4,03	209,57	4,67	33,91	15,91
Laki-laki	100,97	3,61	125,02	4,46	24,05	23,59
Perempuan	74,68	4,77	84,55	5,00	9,86	4,99

Sumber : BPS Provinsi Lampung, Sakernas

Disparitas gender pada partisipasi angkatan kerja sangat timpang. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki sebesar 85,41 persen hampir dua kali lipat TPAK perempuan yang hanya 54,13 persen (Agustus 2020).

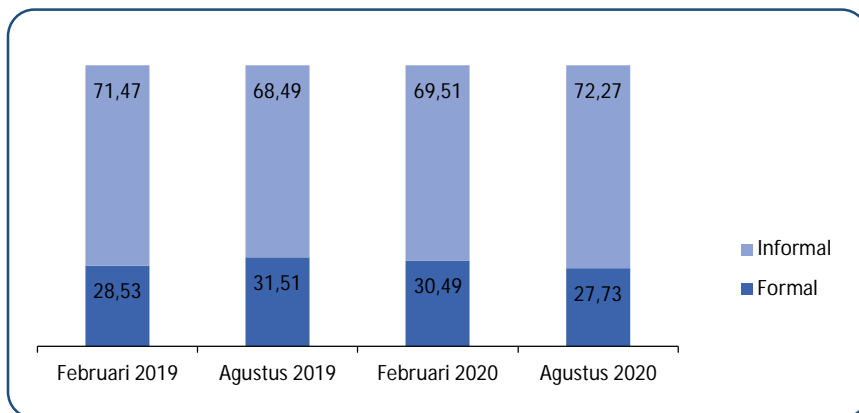
Berkaitan dengan adanya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga. Laki-laki berperan sebagai pencari nafkah (*bread winner*), sedangkan perempuan mengelola rumah tangga dan mengasuh anak-anaknya. Dibanding dengan Agustus 2019, partisipasi laki-laki di pasar tenaga kerja mengalami penurunan baik sebesar 0,97 persen poin sementara perempuan naik 6,24 persen poin.

Disparitas gender pada pengangguran direpresentasikan oleh TPT perempuan yang lebih tinggi dibanding TPT laki-laki yakni 5,00 persen berbanding 4,46 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang relatif besar mengindikasikan adanya potensi yang tinggi pada partisipasi kerja. Dibanding tahun sebelumnya, tingkat pengangguran laki-laki dan perempuan pada Agustus 2019 di pasar tenaga kerja sama-sama meningkat masing-masing sebesar 23,59 persen poin dan 4,99 persen poin.

Jumlah angkatan kerja yang besar tidak terserap oleh pertumbuhan ekonomi, atau terserap namun hanya di sektor informal yang tidak produktif. Peranan perempuan dalam pasar kerja meningkat tetapi dengan kualitas pekerjaan di sektor informal, atau sebagai pekerja keluarga tak dibayar. Tabungan belum terwujud karena rendahnya pendapatan. Pengangguran muncul karena rendahnya tingkat pertumbuhan permintaan terhadap tenaga kerja di sektor industri modern dan tingkat pertumbuhan yang cepat dari persediaan tenaga kerja kota yang berasal dari desa (Todaro,1995). Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Gambar 5.6

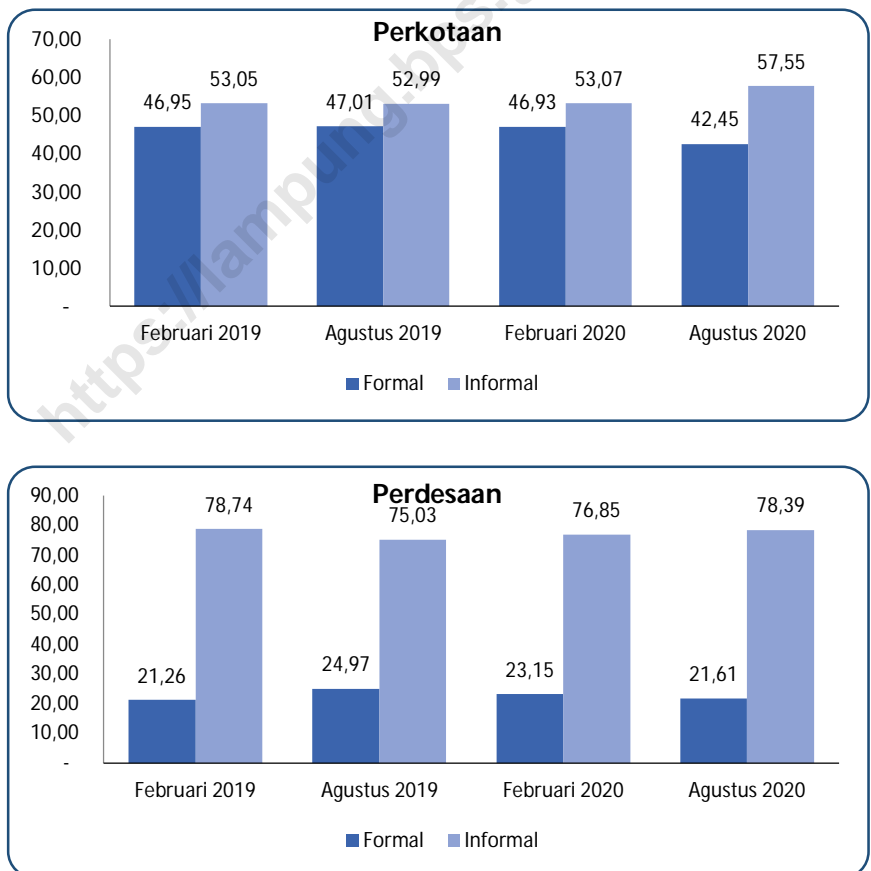
Perkembangan Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Ekonomi Formal dan Informal di Provinsi Lampung Agustus 2019-2020



Sumber : BPS Provinsi Lampung, Sakernas

Keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran ternyata semu karena tenaga kerja informal masih besar dan *under employment* setiap tahun meningkat. Bukti kegagalan transformasi dalam pasar kerja formal adalah masih besarnya kontribusi tenaga kerja informal di sektor pertanian dalam pasar kerja di Provinsi Lampung. Sebagian besar tenaga kerja informal bekerja di sektor pertanian sementara kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Provinsi Lampung cukup dominan. Kondisi ini menggambarkan penduduk perkotaan maupun perdesaan terbelenggu dalam kemiskinan (Lamba, 2011).

Gambar 5.7
Perkembangan Penduduk yang Bekerja di Sektor Formal/Informal dan Kota-Desa di Provinsi Lampung, Agustus 2019-2020



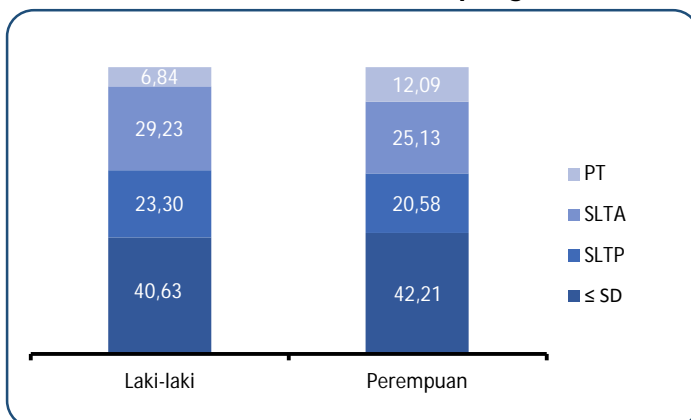
Sumber : BPS Provinsi Lampung, Sakernas

Sektor informal merupakan usaha yang tidak memerlukan modal banyak, pendidikan tinggi, urus izin yang berbelit, dan teknologi canggih. Sektor informal hanya memerlukan *skill* atau keahlian. Faktor-faktor seperti ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengembangkan usaha di sektor ini. Menurut data Sakernas Agustus 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk yang bekerja 2020 pada sektor informal dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (lihat Gambar 5.6). Status pekerjaan utama yang terbanyak pada sektor informal adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (20,47 persen), pekerja keluarga (19,94 persen), dan berusaha sendiri (18,48 persen).

Ketimpangan kegiatan ekonomi formal dan informal terlihat signifikan di perdesaan dibanding perkotaan. Pada Agustus 2020 jumlah pekerja informal di perdesaan mencapai 78,39 persen atau hampir empat kali jumlah pekerja formal. Pekerja di sektor informal umumnya berpendidikan rendah dan tidak mempunyai keterampilan khusus. Kondisi ini terkait erat dengan rendahnya produktivitas di perdesaan. Sementara itu jumlah pekerja formal dan informal di perkotaan relatif berimbang yakni sebanyak 42,45 persen dan 57,55 persen. Fenomena ini mengindikasikan pentingnya peran sektor informal dalam kegiatan ekonomi di perkotaan.

Tenaga kerja menurut pendidikan, mutu modal manusia (*human capital*) masih rendah walaupun ada peningkatan signifikan dalam satu dasawarsa terakhir. Tidak ada disparitas gender yang signifikan pada latar belakang pendidikan angkatan kerja.

Gambar 5.8
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin Provinsi Lampung, 2019



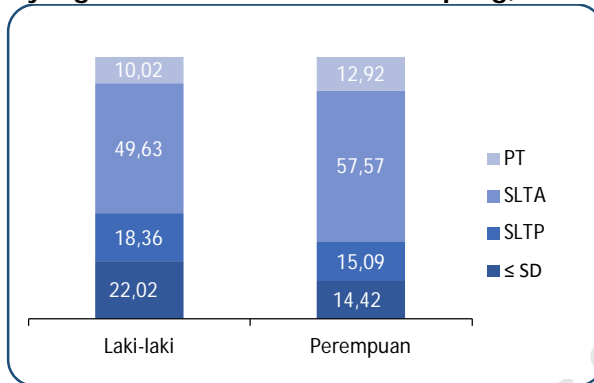
Sumber : BPS Provinsi Lampung, Sakernas

Berbicara tentang pendapatan rumah tangga tentunya tidak terlepas dari kontribusi seluruh anggota rumah tangga baik laki-laki maupun perempuan. Anggota rumah tangga perempuan terdiri dari istri kepala rumah tangga, anak perempuan, menantu dan anggota rumah tangga perempuan lainnya. Saat ini banyak perempuan yang bekerja atau harus bekerja untuk memenuhi atau menambah pendapatan rumah tangga. Perempuan bekerja untuk menambah penghasilan tidak dapat terlepas dari situasi kemiskinan yang melanda suatu rumah tangga, akan tetapi perempuan bekerja tentunya bukan hanya karena faktor kemiskinan tetapi juga faktor kesempatan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang perempuan.

Perempuan mempunyai potensi dalam memberikan kontribusi pendapatan rumah tangga khususnya rumah tangga miskin. Dalam rumah tangga miskin anggota rumah tangga perempuan terjun ke pasar kerja untuk menambah pendapatan rumah tangga yang dirasakan tidak cukup. Perempuan ternyata lebih mudah memasuki pasar kerja terutama sektor informal. Hasil penelitian Badrun (2004), mengatakan bahwa dari 53,44 persen perempuan yang bekerja, 72,29 persen adalah pekerja tetap, artinya perempuan mempunyai kepastian dalam memperoleh pendapatan. Kontribusi perempuan pada peningkatan pendapatan rumah tangga miskin perbulan cukup signifikan yaitu sebesar Rp272.357,00 atau 39,91 persen dari total pendapatan rumah tangga berjumlah Rp681.081,00. Perempuan juga mempunyai kemampuan untuk bekerja di sektor publik, selain lebih luwes dan lebih mampu menyesuaikan diri dalam menghadapi krisis ekonomi, misalnya, perempuan lebih banyak mengambil inisiatif untuk menggantikan peran suami yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam mencari nafkah.

Kontribusi perempuan di bidang ekonomi telah membantu mengangkat keluarga dari kondisi sangat miskin ke kondisi diambang garis tidak miskin. Apabila perempuan (dalam hal ini istri dan anak perempuan) tidak membantu ekonomi rumah tangga, dapat diduga bahwa kondisi ekonomi rumah tangganya akan lebih buruk. Menurut Dong Kyo Choi dan Dai Young Kim bahwa kontribusi perempuan dalam rumah tangga berpendapatan rendah adalah tinggi, dan sebaliknya kontribusi perempuan dalam rumah tangga berpendapatan tinggi adalah rendah.

Gambar 5.9
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Lampung, 2019



Sumber : BPS Provinsi Lampung, Sakernas

Ditinjau dari tingkat pendidikan terlihat bahwa pengangguran didominasi oleh mereka yang berpendidikan SMA hingga sarjana. Kondisi ini diduga terkait dengan harapan terhadap jenis pekerjaan yang diinginkan. Mereka yang tidak terdidik tidak akan makan kalau tidak bekerja sehingga mereka mau melakukan pekerjaan apa saja demi sesuap nasi. Sedangkan bagi mereka yang memperoleh pendidikan lanjutan mereka hanya mau bekerja kalau hal itu memberi uang, status atau kepuasan yang relatif tinggi. Pengangguran erat kaitannya dengan kemiskinan. Kemiskinan dapat diibaratkan seperti benang kusut yang sangat susah dibenahi. Menurut Mubyarto (2004) kemiskinan adalah suatu situasi serba kekurangan yang disebabkan oleh terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin, dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan.

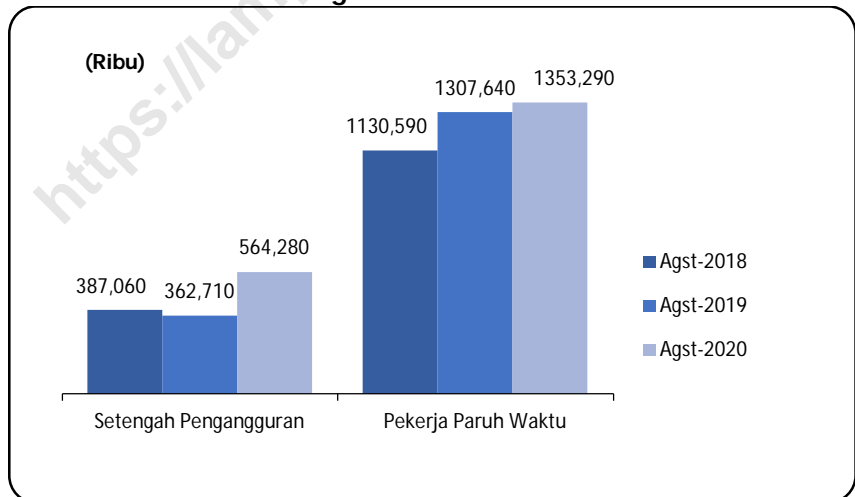
Pengangguran merupakan salah satu masalah pokok dalam bidang ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi menjadi beban bagi penduduk yang bekerja, karena harus menanggung biaya ekonomi para pengangguran tersebut. Selain itu, tingkat pengangguran yang tinggi juga dapat menimbulkan permasalahan lainnya, seperti masalah sosial, keamanan, dan stabilitas politik.

Informasi lain yang berkaitan dengan permasalahan pengangguran namun kurang mendapat perhatian adalah jumlah pekerja yang tergolong pekerja tidak penuh. Golongan ini mencakup pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (35 jam dalam seminggu). Rendahnya jam kerja

mengindikasikan rendahnya pendapatan yang diperoleh pekerja tersebut, yang tentunya berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraannya.

Ada dua kelompok pekerja dengan jam kerja tidak penuh yaitu mereka yang masih mencari kerja disebut setengah penganggur terpaksa dan mereka yang tidak mencari pekerjaan lagi disebut setengah penganggur sukarela atau pekerja paruh waktu. Pada Agustus 2019, jumlah pekerja tidak penuh sebanyak 1,63 juta jiwa atau meliputi 39,89 persen dari penduduk bekerja. Jumlah tersebut meningkat dibanding Agustus 2018 yang mencapai 1,48 juta jiwa. Ini merefleksikan turunnya produktivitas dari tenaga kerja tersebut. Dari dua jenis pekerja tidak penuh, setengah penganggur terpaksa terlihat berfluktuasi dengan kondisi akhir terjadi penurunan pada bulan Agustus 2019. Sedangkan setengah penganggur sukarela terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Fenomena ini biasanya dipengaruhi oleh peningkatan daya beli. Walaupun jam kerja pendek, pendapatan yang diperoleh sudah mencukupi.

Gambar 5.10
**Jumlah Pekerja Tidak Penuh di Provinsi Lampung,
Agustus 2018-2020**



Sumber : BPS Provinsi Lampung, Sakernas

5.2.4 Masih Belum Stabilnya Tingkat Inflasi

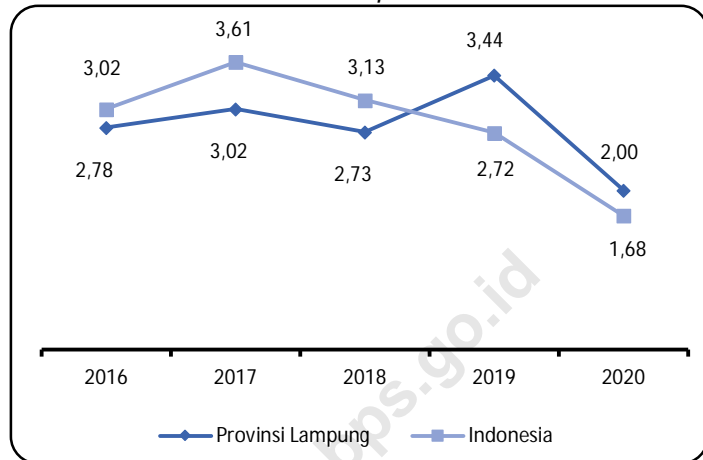
Naiknya harga barang yang dibutuhkan masyarakat menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun. Semakin tinggi indeks harga konsumen berarti harga barang yang dibutuhkan masyarakat semakin mahal sehingga masyarakat tidak mampu menjangkau. Semakin

rendahnya daya beli masyarakat atau semakin tidak mampunya masyarakat untuk mengkonsumsi barang menunjukkan rendahnya kesejahteraan masyarakat.

Kenaikan harga barang tersebut tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat apabila pendapatan masyarakat naik lebih tinggi dibanding dengan kenaikan harga barang. Pengamatan menunjukkan bahwa indeks upah buruh selalu lebih tinggi dibanding dengan indeks harga konsumen. Dalam lima tahun terakhir terjadi peningkatan upah buruh mencapai 8 persen, sementara tingkat inflasi tidak sampai 3 persen. Pada kondisi normal, dikatakan buruh masih mampu membeli barang-barang kebutuhan hidupnya karena upahnya naik lebih tinggi dibanding dengan kenaikan harga barang. Namun di tahun 2020, perlu dikaji lebih dalam untuk mengatakan daya beli masyarakat meningkat. Inflasi rendah yang terjadi di kisaran angka 2 persen dipengaruhi oleh melemahnya permintaan penduduk terhadap barang kebutuhan pokok, sebagai dampak dari merebaknya pandemi COVID-19 sejak awal tahun. Pembatasan jarak yang diberlakukan untuk mencegah virus berkembang menyebabkan perusahaan mengatur jadwal *shift* pekerjaannya, waktu produksi tidak optimal, dan jumlah produksi menurun. Banyak perusahaan yang harus mengurangi produksi karena penurunan permintaan. Bahkan beberapa perusahaan mengurangi atau “merumahkan sementara” pekerjaannya sehingga tingkat pengangguran bergeser mengalami peningkatan. Dampaknya secara umum daya beli penduduk menjadi menurun dan tingkat kemiskinan bertambah.

Besaran inflasi gabungan Provinsi Lampung merupakan ukuran kenaikan harga yang terjadi di Kota Bandar Lampung dan Metro. Dalam periode tahun 2016-2018, kenaikan harga di Provinsi Lampung berkisar antara 2,73-3,02 persen, dan posisinya berada di bawah laju inflasi tingkat Nasional. Namun sesudah tahun 2018, kenaikan harga kebutuhan pokok di provinsi ini bergerak melampaui rata-rata inflasi secara nasional. Pada tahun 2019 terjadi lonjakan inflasi cukup tinggi dari 2,73 persen menjadi 3,44 persen, namun di tahun 2020 merosot turun di level 2 persen namun masih di atas nasional.

Gambar 5.11
**Perkembangan Inflasi Gabungan Provinsi Lampung
 dan Indonesia, 2016-2020**



Sumber : BPS RI dan BPS Provinsi Lampung

Orang miskin cenderung lebih banyak menghabiskan pendapatannya untuk kebutuhan makanan. Oleh sebab itu efek inflasi bahan makanan akan lebih terasa bagi orang miskin. Dampak kenaikan harga terhadap besarnya peningkatan angka kemiskinan tergantung terhadap posisi pemasaran (*net marketing position*) sebagai konsumen bahan makanan (*net food buyer*) atau produsen bahan makanan (*net food seller*) dan besarnya konsumsi masyarakat yang digunakan untuk membeli kebutuhan pangan. Hasil studi Bank Dunia 2008 juga menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia (lebih dari 75 persen) adalah konsumen bahan makanan (*net food buyer*) bukan produsen bahan makanan (*net food producer*) sehingga peningkatan harga bahan makanan ini tidak dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat. Dan tahun 2020, diperburuk dengan besarnya kenaikan harga untuk komoditi makanan, minuman dan tembakau yang mencapai angka 4,05 persen.

5.2.5 Ketimpangan Antarkelompok Pendapatan

Upaya pembangunan manusia dari sisi ekonomi tidak hanya dihadapkan pada permasalahan belum efisiennya penggunaan tenaga kerja pertanian, tetapi juga dihadapkan pada masalah ketimpangan. Hal tersebut terlihat dari distribusi pengeluaran penduduk yang belum merata. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen,

ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada Maret 2020, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 20,67 persen pengeluaran daerah. Ini berarti Provinsi Lampung berada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan Maret 2020 ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kondisi September 2019 yang sebesar 20,13 persen.

Kondisi tersebut nampaknya belum terpengaruh pandemi COVID-19 yang baru merebak bulan Maret 2019. Sementara itu 20 persen penduduk berpengeluaran tinggi menguasai 41,22 persen pengeluaran daerah. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat yang cenderung lebih banyak dinikmati oleh penduduk berpendapatan tinggi. Namun bila dibandingkan dengan distribusi pengeluaran nasional, distribusi pengeluaran penduduk Provinsi Lampung nampak lebih merata. Secara nasional, sebanyak 45,49 persen pengeluaran daerah dinikmati oleh 20 persen penduduk berpendapatan di atas.

Tabel 5.4

Distribusi Pengeluaran Penduduk Menurut Kriteria Bank Dunia Provinsi Lampung dan Nasional, Maret 2020

Indikator	Lampung	Nasional
(1)	(2)	(3)
40 % bawah	20,67	17,73
40 % tengah	38,10	36,78
20 % atas	41,22	45,49

Sumber : BPS RI dan BPS Provinsi Lampung

Ukuran ketimpangan Bank Dunia pun mencatat bahwa ketimpangan di perkotaan lebih buruk dibandingkan dengan ketimpangan di perdesaan. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada Maret 2020 adalah sebesar 19,89 atau tergolong ketimpangan rendah. Sementara itu, persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan pada Maret 2020 adalah sebesar 21,95 persen yang berarti juga berada pada kategori ketimpangan rendah.

Dalam upaya mengurangi defisiensi lapangan kerja produktif perlu memahami sifat dari defisiensi lapangan kerja produktif dan untuk mengidentifikasi kendala-kendala serta peluang untuk meningkatkan pertumbuhan yang inklusif dan menghasilkan banyak lapangan kerja. Hal

ini dilakukan dengan fokus pada pemberian dasar pengetahuan yang baik untuk dapat mengembangkan kebijakan yang efektif, reformasi kelembagaan dan intervensi lainnya. Salah satu program pemerintah yang sedang gencar dikembangkan adalah usaha Mikro yang selama ini tidak berjalan dengan mulus atau stagnan. Penyebabnya antara lain rendahnya laju pertumbuhan usaha kecil, para usaha kecil mengalami keterbatasan modal, dan diperberat dengan terbatasnya akses pada perbankan karena ketidakmampuan memenuhi persyaratan bank teknis. Kendala-kendala lain yang juga menjadi penyebab tersebut antara lain kesulitan dalam mengakses pasar dan informasi, belum memiliki administrasi yang teratur, minimnya aktiva tetap, kurang terjaminnya pasokan bahan baku, pendidikan yang relatif rendah, kurang mampu bersaing, kualitas produk kurang memadai, dan jauh dari sentuhan teknologi.

5.3. Tantangan dan Peluang Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengamatan data, dapat teridentifikasi beberapa faktor yang menjadi penyebab defisiensi lapangan kerja produktif dan pekerjaan yang layak.

Infrastruktur Jalan Belum Optimal

Kondisi infrastruktur suatu wilayah akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian wilayah tersebut. Kegiatan perekonomian akan lancar dan berjalan baik bila ditunjang dengan infrastruktur yang baik. Salah satu infrastruktur yang memegang peranan penting dalam menunjang kegiatan perekonomian adalah jalan.

Tabel 5.5

Panjang Jalan Negara dan Jalan Provinsi Provinsi Lampung Menurut Kondisi (Kilometer), 2020

Kondisi Jalan	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Baik	-	1.121.801	1.121.801
Sedang	-	138.239	138.239
Rusak	-	907.343	907.343
Rusak Berat	-	342.890	342.890

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Lampung, Lampung Dalam Angka 2020

Kondisi infrastruktur jalan di Provinsi Lampung dapat sedikit tergambar dari data pada tabel di atas. Infrastruktur jalan didominasi oleh jalan provinsi.

Namun kondisi sebagian jalan ini rusak bahkan rusak berat. Dari total 2.510,27 ribu km panjang jalan Provinsi Lampung, sepanjang 1.250,23 ribu km atau 49,8 persen dalam keadaan rusak.

Dengan adanya dukungan infrastruktur yang baik seperti fasilitas jalan, sarana komunikasi dan keuangan, akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dari peningkatan output yang bermuara pada meningkatnya permintaan kerja, dan berdampak pada pengurangan angka penduduk miskin (Marhaeni dalam Prastyadewi, 2011). Dengan demikian, tersedianya infrastruktur akan mempengaruhi jumlah penyerapan tenaga kerja, peningkatan distribusi produksi barang dan jasa sektor perdagangan, yang berujung pada pengentasan kemiskinan wilayah.

<https://lampung.bps.go.id>

BAB

6

Disparitas Pembangunan Manusia

<https://laporan.bps.go.id>

Disparitas Pembangunan Manusia

Kesetaraan gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesetaraan kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan bagi laki-laki maupun perempuan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumber daya, dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut.

Upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara diwujudkan dalam kebijakan negara maupun dalam kebijakan informal. Hal ini dipelopori oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama terkait dengan kendala-kendala yang struktural maupun kultural yang terjadi pada masyarakat.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender telah ditetapkan melalui GBHN 1999, UU No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas 2000-2004) dan dipertegas dalam instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000. Permendagri No. 15 Tahun 2008 telah mengatur juga tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Hal ini sejalan dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984.

Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender dapat diukur, salah satunya adalah dengan indeks pembangunan gender (IPG). Indikator ini telah diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dalam Laporan pembangunan Manusia tahun 1995. Indeks pembangunan gender adalah ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Indeks pembangunan gender merupakan ukuran pencapaian pembangunan gender yang merupakan turunan dari IPM.

Melalui angka IPG, kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan mampu dijelaskan. Kondisi tersebut terlihat dari sisi umur harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak yang tergambarkan melalui pengeluaran per kapita per tahun.

6.1. Disparitas Jenis Kelamin

Sejalan dengan semangat pembangunan nasional yang bersifat adil, demokratis, terbuka, partisipatif, dan terintegrasi. Salah satu tujuan pembangunan manusia adalah untuk memperluas pilihan bagi seluruh penduduk. Untuk mewujudkannya, pemerintah berkewajiban untuk menjamin masyarakat agar memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini.

Namun beberapa hal masih belum sesuai yang diharapkan dan menyebabkan kemajuan pembangunan manusia menjadi tidak merata. Hal ini berdampak pada lahirnya disparitas pembangunan manusia. Disparitas pembangunan manusia muncul antarindividu, antargender, antardimensi, dan antarwilayah. Disparitas ini tentu harus ditekan dan diupayakan agar hilang. Idealnya setiap individu mempunyai kesempatan dan pilihan yang sama. Begitu pula dengan kesempatan dan pilihan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Tentu saja hal tersebut harus merata di semua wilayah, di manapun mereka berada dan pada dimensi apapun.

Disparitas Antarindividu

Fokus dan perhatian utama dalam paradigma pembangunan manusia adalah manusia yang merupakan tujuan akhir pembangunan. Setiap individu harus dapat dipastikan agar memiliki kesempatan yang sama dalam memperluas pilihan-pilihannya. Konsep ini akan menjamin bahwa semua individu mempunyai capaian pembangunan manusia yang sama, adil, dan merata.

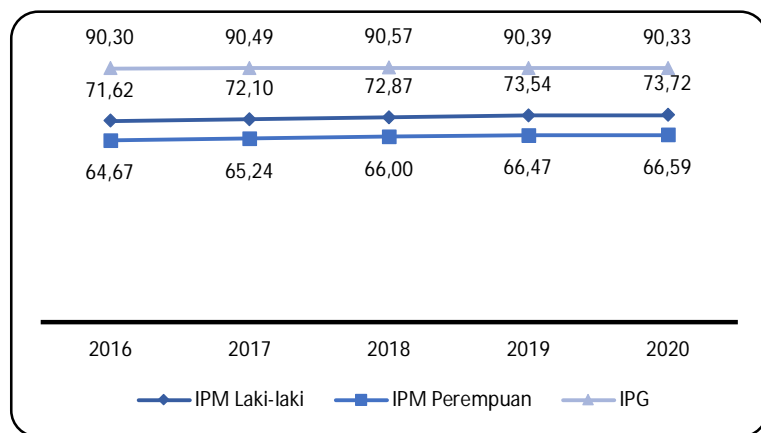
Kenyataannya hal tersebut tidaklah mudah dicapai. Disparitas pembangunan manusia yang terjadi antarindividu tidak dapat dihindari. Hal ini mengindikasikan bahwa kesempatan untuk memperluas pilihan tidak terdistribusi merata. Sebagian penduduk dapat memperoleh pilihan-pilihannya, sementara yang lain berada dalam keterbatasan pilihan untuk mengakses sumber daya.

Disparitas Gender

Istilah gender berbeda dengan karakteristik laki-laki dan perempuan secara biologis. Konsep gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan, serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan, sebab ketidakadilan yang terjadi dapat mengakibatkan kerugian bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan. Isu gender memang sudah sejak lama menjadi perhatian dunia. Dalam agenda pembangunan global yang bertajuk *Sustainable Development Goals* (SDGs), isu gender menjadi salah satu target dalam SDGs. Pada *goal* kelima, United Nations (UN) berkomitmen untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia.

United Nations Development Programme juga sangat menyoroti isu gender dan memasukkannya dalam beberapa indikator yang lebih spesifik. Pada HDR 2010, UNDP telah memperkenalkan dua indikator yang telah mempertimbangkan aspek gender. Kedua indikator itu adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan *Gender Inequality Index* (GII). Indeks pembangunan gender dihitung untuk melihat capaian pembangunan manusia yang diraih oleh laki-laki dan perempuan, sementara GII lebih menekankan pada disparitas yang terjadi antargender.

Gambar 6.1
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Lampung, 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Lampung

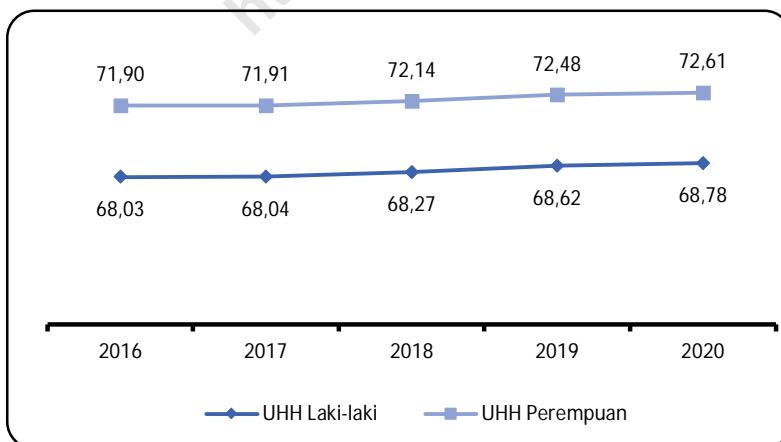
Berdasarkan IPG tahun 2020 dijelaskan bahwa pembangunan manusia yang dicapai laki-laki masih lebih tinggi dibanding perempuan yang merefleksikan masih adanya disparitas gender. Tercatat bahwa IPM laki-laki mencapai 73,72 sementara IPM perempuan sebesar 66,59. Nilai IPG Provinsi Lampung pada tahun 2020 sebesar 90,33, menurun 0,06 poin dibanding capaian tahun 2019.

IPM laki-laki sudah masuk dalam kategori tinggi yaitu antara 70 sampai dengan 80, sedangkan IPM perempuan masih dalam taraf sedang yaitu antara 60 sampai dengan 70. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan dan ekonomi perempuan secara umum lebih rendah dibanding laki-laki.

Ditinjau dari sisi kesehatan, umur harapan hidup laki-laki dan perempuan di Provinsi Lampung setiap tahun terus meningkat. Namun jika dibandingkan, umur harapan hidup laki-laki di Provinsi Lampung cenderung lebih rendah dibandingkan umur harapan hidup perempuan. Hal ini terkait dengan *female advantage* (FA) terutama faktor biologis dan tingkah laku. Menurut Lemaire (2002), secara biologis perempuan memiliki gen dan hormon yang menguntungkan untuk hidup lebih lama. Pada tahun 2020, umur harapan hidup perempuan mencapai 72,61 tahun, sedangkan umur harapan laki-laki adalah 68,78 tahun.

Gambar 6.2

Perkembangan Umur Harapan Hidup Laki-laki dan Perempuan Provinsi Lampung, 2016-2020 (Tahun)

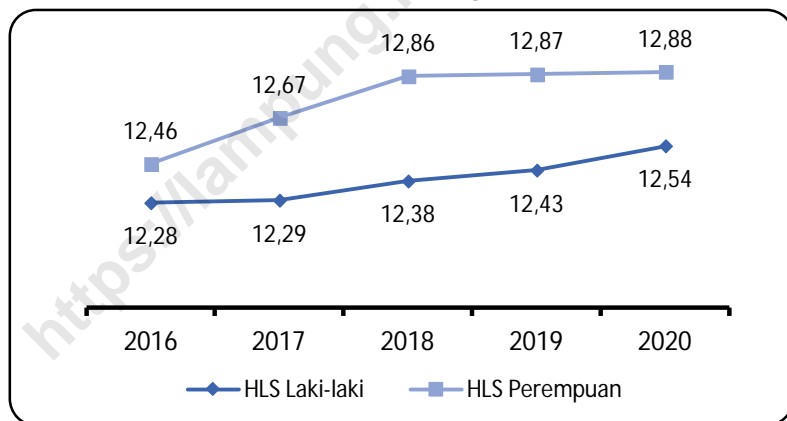


Sumber : BPS Provinsi Lampung

Jika dilihat melalui aspek pendidikan, ukuran keberhasilan pendidikan yang digunakan adalah harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Berbeda dengan harapan lama sekolah yang memperlihatkan capaian keberhasilan jangka pendek, rata-rata lama sekolah memperlihatkan capaian keberhasilan pendidikan dalam jangka panjang. Kedua indikator ini menggambarkan capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumber daya manusia yang berkualitas di suatu wilayah.

Harapan lama sekolah (HLS) merupakan satu ukuran kualitas dan keberhasilan pendidikan dari penduduk usia 7 tahun keatas di Provinsi Lampung. Secara umum perkembangan harapan lama sekolah laki-laki dan perempuan terus meningkat selama kurun waktu 2016-2020.

Gambar 6.3
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Laki-laki dan Perempuan Provinsi Lampung, 2016-2020 (Tahun)



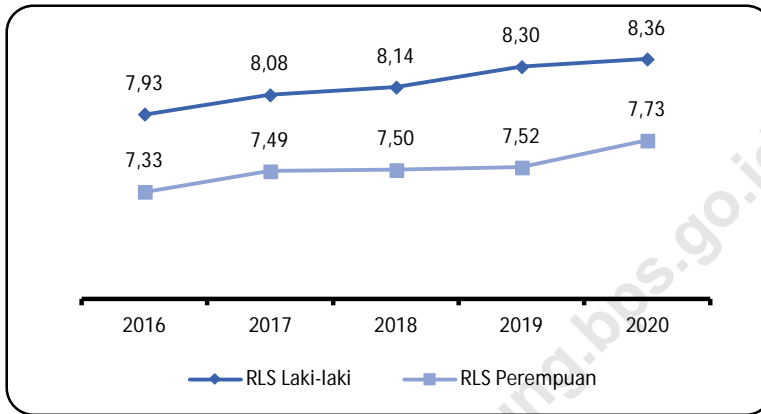
Sumber : BPS Provinsi Lampung

Perbedaan harapan lama sekolah antara laki-laki dan perempuan di tahun 2020 relatif menyempit, setelah sebelumnya diskrepansi laki-laki dan perempuan melebar terjadi sejak 2017. Harapan lama sekolah perempuan di Provinsi Lampung cenderung lebih tinggi dibandingkan harapan lama sekolah laki-laki. Harapan lama sekolah perempuan di tahun 2020 mencapai 12,88 tahun sedangkan laki-laki sedikit lebih rendah yaitu 12,54 tahun.

Ukuran lainnya, rata-rata lama pendidikan laki-laki di Provinsi Lampung sekitar 1 (satu) tahun lebih lama dibanding perempuan. Nilai rata-rata lama sekolah laki-laki adalah 8,36 tahun atau setara kelas VIII sedangkan

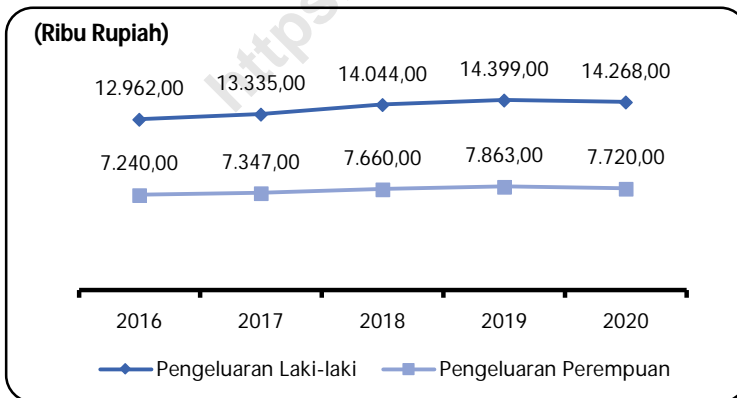
perempuan adalah 7,73 tahun atau setara kelas VII. Selama tahun 2016-2020 rata-rata lama sekolah perempuan dan laki-laki terus meningkat.

Gambar 6.4
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Laki-laki dan Perempuan Provinsi Lampung, 2016-2020 (Tahun)



Sumber : BPS Provinsi Lampung

Gambar 6.5
Perkembangan Pengeluaran Laki-laki dan Perempuan Provinsi Lampung 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Lampung

Dari sisi pengeluaran yang merupakan ukuran pendekatan bagi pendapatan, laki-laki lebih tinggi hampir dua kali nilai pengeluaran perempuan. Pada tahun 2020 pengeluaran laki-laki mencapai 14,27 juta rupiah sedangkan perempuan hanya 7,72 juta rupiah. Pengeluaran per kapita disesuaikan baik laki-laki maupun perempuan pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat efek dari adanya pandemi COVID-19 yang

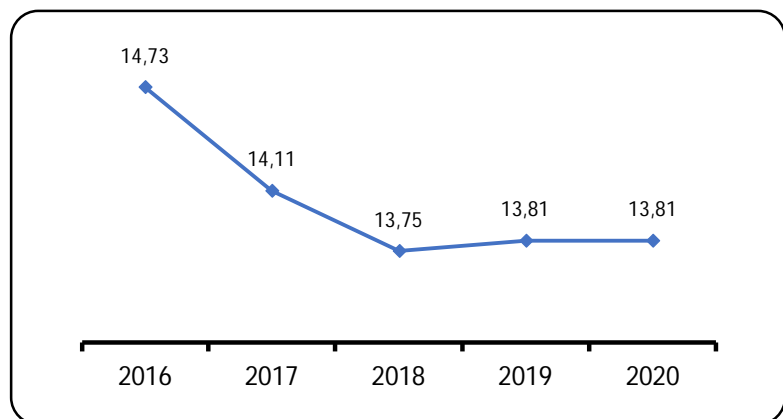
turut menimpa Indonesia. Secara umum baik IPM laki-laki dan perempuan serta indikator-indikator pembentuknya terus mengalami peningkatan kecuali pada pengeluaran per kapita disesuaikan.

6.2. Disparitas Antarkabupaten/kota

Dalam perspektif kabupaten/kota, disparitas pembangunan manusia menjadi petunjuk penting tentang kinerja yang telah diupayakan pemerintah dalam mendistribusikan pembangunan pada tingkat provinsi. Bagi pemerintah pusat, analisis disparitas di kabupaten/kota akan membantu dalam memberikan fokus perhatian bagi kemajuan pembangunan manusia. Selain terjadi di tingkat nasional, disparitas pembangunan manusia juga terjadi pada level kabupaten/kota di dalam provinsi.

Sampai saat ini, disparitas pembangunan manusia antarkabupaten/kota juga masih terjadi. Disparitas ini terutama cukup mencolok apabila melihat capaian IPM Kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Mesuji. Perbedaan capaian IPM kedua wilayah masih berada pada kisaran hampir 14 poin. Pada tahun 2020 ini perbedaan IPM antar kedua daerah dengan capaian tertinggi dan terendah tersebut tidak mengalami perubahan berarti. Hal ini menjadi masukan bahwa disparitas antara kabupaten/kota perlu menjadi perhatian.

Gambar 6.6
Selisih IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Lampung

Pada tahun 2020 IPM Kota Bandar Lampung bersama dengan Kota Metro tercatat mencapai 77 poin, dan merupakan daerah tingkat II dengan status IPM tertinggi di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2019 mampu meningkatkan status pembangunan manusia dari status sedang menjadi tinggi. Sedangkan capaian IPM Kabupaten Mesuji merupakan yang terendah di Provinsi Lampung tercatat hanya 63,63.

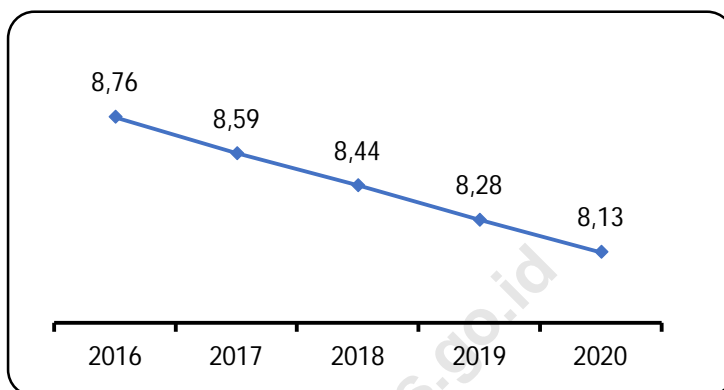
Selisih IPM antara Kabupaten Mesuji dengan Kota Bandar Lampung pada tahun terakhir relatif sama seperti tahun sebelumnya disebabkan peningkatan IPM Kabupaten Mesuji dan Kota Bandar Lampung dengan capaian peningkatan angka IPM relatif sama. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatra Selatan ini berhasil meningkatkan capaian IPM sebesar 0,11 poin dari 63,52 menjadi 63,63 poin pada tahun 2020. Sementara peningkatan yang sama angka IPM Kota Bandar Lampung menjadi 77,44 poin.

Disparitas pembangunan manusia pada level kabupaten/kota juga terjadi pada indikator yang membentuknya. Umur harapan hidup dan rata-rata lama sekolah menunjukkan disparitas yang semakin kecil. Namun untuk harapan lama sekolah dan pengeluaran rata-rata yang disesuaikan diskrepansinya relatif membesar karena kenaikan cukup besar pada harapan lama sekolah di Kota Bandar Lampung.

Kesehatan merupakan salah satu bagian vital dari kehidupan manusia. Kesehatan masyarakat di Provinsi Lampung saat ini semakin membaik. Selain membaiknya tingkat kesehatan masyarakat, disparitas tingkat kesehatan antarkabupaten/kota juga semakin kecil. Hal ini terlihat dari tren selisih Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) selama 2016-2020 antara Kabupaten Pesisir Barat dengan Kota Metro yang cenderung menurun.

Pada tahun 2019, umur harapan hidup saat lahir di Kota Metro mencapai 71,63 tahun. Kota yang berpenduduk 169,51 ribu jiwa pada tahun 2020 (proyeksi penduduk 2015-2025 Provinsi Lampung) ini merupakan daerah tingkat II di Provinsi Lampung yang memiliki umur harapan hidup tertinggi. Sementara kabupaten/kota dengan umur harapan hidup paling rendah adalah Kabupaten Pesisir Barat. Kabupaten paling muda di Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk 155,89 ribu jiwa dan secara rata-rata bayi yang baru lahir memiliki umur harapan hidup sekitar 63,50 tahun.

Gambar 6.7
Selisih Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah, 2016-2020 (Tahun)



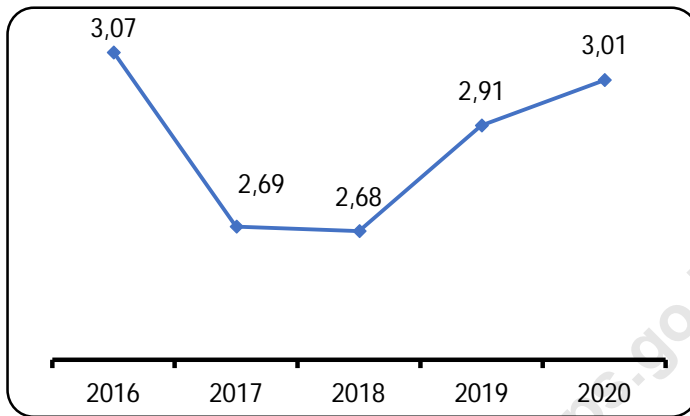
Sumber : BPS Provinsi Lampung

Perkembangan selisih umur harapan hidup antara Kota Metro dengan Kabupaten Pesisir Barat yang semakin menurun dalam kurun waktu 2016-2020 menunjukkan bahwa disparitas sudah semakin berkurang. Hal ini mengindikasikan bahwa kabupaten dengan capaian terendah sudah semakin cepat mengejar ketertinggalannya. Umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Pesisir Barat tumbuh 0,36 persen. Perkembangan di Kabupaten Pesisir Barat relatif lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan di Kota Metro yang hanya 0,11 persen.

Di bidang pendidikan, disparitas pembangunan manusia terlihat dari dua indikator pembentuknya, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka harapan lama sekolah ini merupakan salah satu indikator input dalam bidang pendidikan. Sementara itu, rata-rata lama sekolah merupakan indikator output dari sebuah proses pendidikan.

Secara umum ketimpangan harapan lama sekolah cenderung menurun hingga tahun 2018. Namun pada tahun 2019 hingga 2020 nampak disparitas makin melebar. Ketimpangan harapan lama sekolah terjadi akibat perbedaan capaian yang cukup signifikan antara Kabupaten Mesuji dengan Kota Bandar Lampung.

Gambar 6.8
Selisih Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah, 2016-2020 (Tahun)



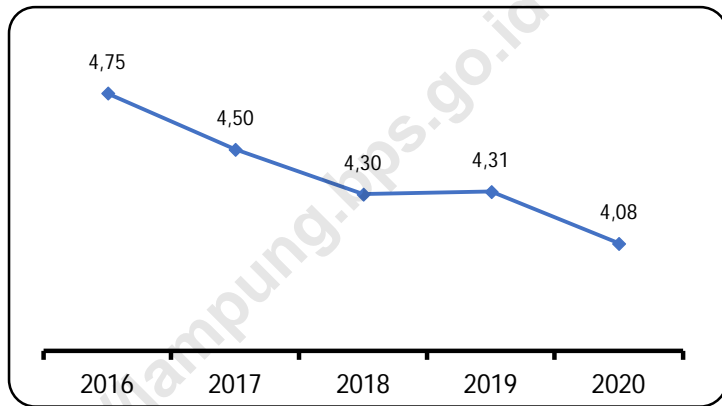
Sumber : BPS Provinsi Lampung

Penduduk usia 7 tahun ke atas di Kota Bandar Lampung memiliki harapan untuk mengenyam pendidikan formal hingga mencapai 14,64 tahun atau setara Diploma III. Sementara penduduk Kabupaten Mesuji hanya memiliki harapan untuk mengenyam pendidikan formal hingga 11,63 tahun atau setara kelas XI. Pada tahun 2020, pertumbuhan HLS Kabupaten Mesuji mencapai 0,09 persen sementara Kota Bandar Lampung mencapai 0,76 persen. Untuk kecepatan pertumbuhan HLS selama 2016–2020, Kabupaten Mesuji mencapai 1,55 sedangkan Kota Bandar Lampung mencapai 1,86. Meskipun pertumbuhan dan kecepatan pertumbuhan HLS-nya tidak setinggi Kota Bandar Lampung namun jika dibandingkan dengan kabupaten lain, Kabupaten Mesuji mengalami perbaikan sehingga pada waktu tertentu harapannya dapat menyusul kabupaten/kota lain. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi beberapa perbaikan pada aspek pendidikan di Kabupaten Mesuji yang menyebabkan harapan lama sekolah tumbuh sedikit lebih tinggi.

Indikator pendidikan lain yang tercakup dalam penghitungan indeks pembangunan manusia adalah rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Selisih rata-rata lama sekolah dari tahun 2016-2020 cenderung berada pada kisaran 4,08 tahun. Disparitas ini terjadi akibat perbedaan capaian yang nyata antara Kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Mesuji.

Pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah di Kota Bandar Lampung mencapai 10,96 tahun, sedangkan Kabupaten Mesuji menempati posisi terbawah dengan capaian 6,88 tahun. Meskipun memiliki capaian paling rendah, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Mesuji meningkat 4,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara Kota Bandar Lampung meningkat 0,09 persen.

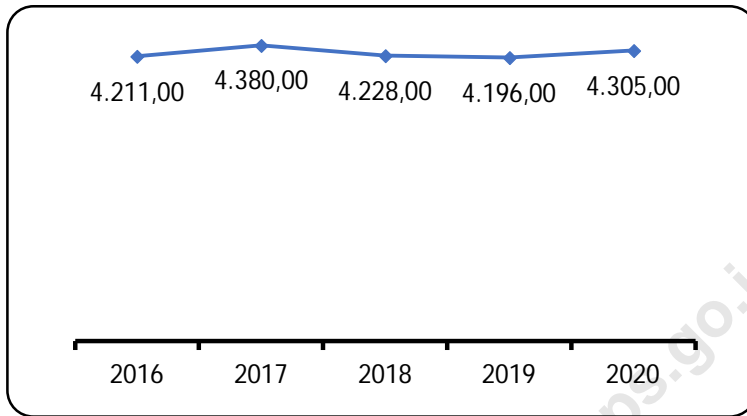
Gambar 6.9
Selisih Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah, 2016-2020 (Tahun)



Sumber : BPS Provinsi Lampung

Standar hidup layak tahun 2020 yang diukur dengan pengeluaran per kapita cenderung menunjukkan adanya penurunan yang terjadi di seluruh kabupaten/kota Provinsi Lampung. Disparitas pada dimensi ini meningkat pada tahun 2020. Rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kota Bandar Lampung mencapai 12,20 juta rupiah. Sementara di Kabupaten Pesawaran menempati posisi terbawah dengan capaian sebesar 7,89 juta rupiah.

Gambar 6.10
Selisih Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota Tertinggi
dan Terendah, 2016-2020 (Ribu Rupiah/Tahun)



Sumber : BPS Provinsi Lampung

Secara umum disparitas pembangunan manusia terjadi pada seluruh indikator. Selama periode 2016-2020, dari empat indikator, yaitu UHH, HLS, RLS, dan pengeluaran per kapita, yang disparitas antarkabupaten/kota-nya terus mengalami perbaikan (disparitas menyempit) adalah pada indikator UHH dan RLS (dapat diperhatikan pada Gambar 6.7 dan Gambar 6.9). Disparitas pada indikator HLS (perhatikan Gambar 6.8) cenderung melebar sementara pada indikator pengeluaran per kapita relatif stagnan (perhatikan Gambar 6.10).



Tantangan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

<http://lampung.bps.go.id>

Tantangan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2019, sejumlah indikator makro ekonomi Provinsi Lampung menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,27 persen lebih tinggi dari capaian nasional sebesar 5,02 persen, di tengah ketidakpastian perekonomian global dan risiko perang dagang antara Amerika dan Tiongkok. Sementara itu, tingkat inflasi gabungan 2019 yang tetap terjaga (3,44 persen) dan tingkat pengangguran Agustus 2019 yang cukup rendah (4,04 persen).

Memasuki tahun 2020, tantangan pembangunan ekonomi semakin kompleks, ditambah dengan ujian penyebaran virus COVID-19 pada awal bulan Maret 2020. Hingga akhir tahun 2020, serangan virus COVID-19 khususnya di Indonesia dan termasuk wilayah Provinsi Lampung menjadi pandemi global dengan jumlah pasien yang terus bertambah.

Potret pembangunan sumber daya manusia masih terlihat rendah kualitasnya. Penduduk miskin di Provinsi Lampung pada September 2020 tercatat mencapai 1,09 juta orang atau sebesar 12,76 persen dari total penduduk. Jumlahnya bertambah sebanyak 41,82 ribu orang dibanding kondisi Maret 2020 yang mencapai 1,05 juta orang (12,34 persen). Sumber daya manusia Provinsi Lampung tahun 2020 yang tercermin dari angka indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 69,69 masih berstatus "sedang". Walaupun Indeks Ketimpangan Gini Rasio sebesar 0,320 pada September 2020 menunjukkan kondisi yang lebih baik dari Indonesia sebesar 0,399.

Tingkat ketimpangan antarwilayah yang rendah belum tentu merefleksikan keberhasilan kebijakan distribusi pembangunan. Tingkat ketimpangan yang rendah bisa jadi mencerminkan tingkat pembangunan yang rendah dan merata di seluruh wilayah. Sebaliknya ketimpangan yang terlalu tinggi bisa berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi, memperlambat pengentasan kemiskinan.

Sejak tahun 2015, World Bank telah memberikan peringatan terkait ketimpangan. Pada tahun 2000, ketimpangan ekonomi di Indonesia meningkat pesat. Pertumbuhan ekonomi yang ada lebih dinikmati oleh seperlima penduduk terkaya daripada masyarakat umum lainnya. Pada tahun 2020, Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku tertinggi Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur masing-masing 66 kali lipat dan 55 kali lipat dibanding PDRB Provinsi Gorontalo yang capaian PDRB-nya terendah. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung sendiri sebesar 8 kali lipat PDRB Provinsi Gorontalo.

Menurut angka proyeksi Sensus Penduduk 2010, Provinsi Lampung memiliki jumlah penduduk yang cukup besar di lingkup Pulau Sumatera. Angkanya mencapai 8,52 juta jiwa pada tahun 2020, yaitu terbesar ketiga setelah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Lampung telah memasuki masa bonus demografi sejak tahun 2014. Bonus demografi akan menyebabkan ketergantungan penduduk usia non produktif (usia tua dan anak-anak) yang harus ditanggung penduduk usia produktif. Kondisi tersebut memberikan tantangannya masing-masing. Tantangan masalah bagi *aging population* adalah biaya pemeliharaan kesehatan, dimana orang dengan usia lanjut biasanya dihadapkan dengan banyak masalah kesehatan sedangkan tantangan demografi usia muda adalah pendidikan dan kualitas SDM.

Hal ini akan menguntungkan bagi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara apabila bonus demografi terjadi. Bonus demografi membawa angin segar dimana Indonesia khususnya Provinsi Lampung akan mendapatkan keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh penurunan rasio ketergantungan, sebagai hasil proses penurunan kematian bayi dan penurunan fertilitas dalam jangka panjang. Bonus demografi ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi menjadi potensi apabila mampu mengambil peluang-peluangnya, dan di sisi lain akan menjadi *boomerang* yaitu beban apabila pemerintah tidak siap dengan sumber daya manusianya. Bonus demografi bisa saja menjadi potensi pembangunan, dengan dua prasyarat berikut:

Pertama adalah tersedianya lapangan kerja yang mencukupi bagi penduduk usia produktif, sehingga penduduk tersebut secara finansial dapat menopang keberadaan penduduk usia non produktif. Kedua, penduduk usia kerja berumur 15 sampai 65 tahun akan benar-benar menjadi produktif manakala dibekali pendidikan dan *skill* yang memadai. Karena jika tidak, mereka justru akan menambah deretan jumlah

pengangguran manakala mereka kalah bersaing dengan pekerja lain dari luar negeri yang mempunyai *skill* dan kemampuan yang lebih mumpuni.

Pendidikan yang berkaitan dengan kependudukan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah secara tidak langsung akan membentuk atau membina sikap dan perilaku yang responsif terhadap pemecahan masalah kependudukan sejak dini sampai usia lanjut. Dengan proses pembentukan perilaku hidup berwawasan kependudukan melalui proses pendidikan baik formal, melalui kursus dan kediklatan atau melalui pemberian informasi dengan menggunakan institusi keluarga atau pun media yang ada di masyarakat, maka diharapkan generasi muda mampu mengetahui, menyadari, dan berperilaku responsif terhadap berbagai permasalahan kependudukan di Indonesia terutama menghadapi bonus demografi.

Bonus demografi bisa menjadi sebuah potensi atau peluang apabila pemerintah mempersiapkan lapangan kerja. Menurut Ristekdikti, ada empat bidang garapan yang harus dilakukan agar penduduk dapat bekerja secara optimal. Bidang garapan pertama adalah melindungi penduduk yang sudah bekerja dapat terus bekerja. Kedua, bagaimana membuka kesempatan kerja agar angkatan kerja baru memperoleh tempat untuk bekerja. Ketiga, memfasilitasi penduduk yang bekerja terus bekerja dan memiliki produktifitas yang tinggi. Keempat, menyiapkan angkatan kerja baru agar memiliki kompetensi yang tinggi sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja.

Penduduk usia muda merupakan komponen utama untuk konsep *windows of opportunity*. Penduduk perlu mendapatkan pendidikan yang memadai, kualitas pekerja penyediaan lapangan kerja yang optimal. Menurut Moertiningsih (2005) dikatakan fenomena ini akan optimal jika tersedia: tenaga kerja berkualitas, tabungan masyarakat yang tinggi, serta meningkatnya partisipasi perempuan, pengangguran rendah dan produktif. Bonus demografi selain memberikan keuntungan bagi pemerintah, juga dapat menjadi *boomerang* apabila pemerintah tidak menyiapkan sumberdaya manusianya maupun lapangan pekerjaannya.

Dengan demikian, distribusi kue pembangunan masih menjadi ujian dan tantangan bagi para ekonom. Menurut teori lingkaran setan kemiskinan, kemiskinan akan mengakibatkan seseorang tidak mampu mengakses pendidikan yang baik. Padahal tingkat dan kualitas pendidikan itu sendiri merupakan kunci bagi seseorang untuk memasuki dunia kerja dan menentukan tingkat penghasilan yang dia peroleh kelak. Selanjutnya tingkat penghasilan akan menentukan apakah dia mampu mengakses

pendidikan yang baik atau tidak, dan begitu seterusnya. Ada sebuah paradigma bahwa yang miskin akan cenderung untuk terus menjadi miskin. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan langkah mitigasi berupa kebijakan pemerintah untuk menyediakan akses pendidikan bagi si miskin secara gratis. Pendidikan yang baik merupakan salah satu jalan keluar untuk memotong rantai kemiskinan yang terjadi secara turun temurun.

Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dalam menciptakan formula dan strategi kebijakan untuk memerangi atau mereduksi permasalahan tersebut. Sehingga sampai saat ini pembangunan manusia masih merupakan isu yang sangat penting. Kualitas sumber daya manusia yang baik merupakan modal dasar pembangunan suatu negara.

Di dalam konteks negara, pemerintah saat ini berfokus pada bagaimana investasi di bidang SDM Indonesia dilakukan. Melalui APBN, 20 persen dari total anggaran belanja untuk fungsi pendidikan. Namun menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jumlah anggaran bukanlah jawaban dari masalah pembangunan SDM melainkan bagaimana anggaran tersebut diarahkan dan untuk apa. Ia menegaskan bahwa ketersediaan dana untuk pembangunan sumber daya manusia Indonesia bukan lagi menjadi permasalahan. Hal ini terlihat dari kemampuan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus meningkat setiap tahunnya.

Mulai tahun 2020 pemerintah berencana untuk memfokuskan pembangunan sumber daya manusia. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar SDM Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain terutama dalam menghadapi era industri 4.0. Masalah tersebut menjadi lebih menantang dengan kemajuan teknologi yang cepat saat ini. Kemajuan industri 4.0, *artificial intelligence*, *robotic*, *crypto currency*, dan sebagainya akan mengubah banyak hal seperti jenis pekerjaan dan tenaga kerja yang dibutuhkan.

Belum lagi revolusi industri 4.0 diterapkan, awal Januari 2019 lalu telah beredar gagasan baru yang muncul dari peradaban Jepang yaitu *Society 5.0* disampaikan dalam Forum Ekonomi Dunia 2019 di Davos, Swiss. Gagasan ini muncul sebagai respon atas revolusi industri 4.0 suatu perkembangan teknologi yang pesat, tetapi peran masyarakat menjadi pertimbangan atas terjadinya revolusi industri 4.0 ini. Konsep *Society 5.0* menekankan unsur sumber daya manusia (SDM) sebagai sentral (*human centered*). Dengan demikian, kedua konsep tersebut tidak berbeda dalam penerapan teknologi

canggih, hanya saja konsep *Society 5.0* lebih menitikberatkan pada unsur manusia sebagai pelaku agar semakin berguna bagi kemanusiaan di segala bidang.

Sebagai konsep yang baru, *Society 5.0* akan mengubah konsep revolusi industri 4.0 yang berpotensi mendegradasi peran manusia. *Society 5.0* akan mentransformasi *big data* yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan menjadi suatu kearifan baru, yang akan didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia guna membuka berbagai peluang yang terkait dengan kemanusiaan. Hal ini dilakukan dengan dibentuknya kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang mampu mentransformasi hal di atas.

Society 5.0 mendorong penggunaan teknologi baru untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi. Internet bukan hanya sebagai informasi melainkan untuk menjalani kehidupan sehingga perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi pada kemudian hari. *Society 5.0* merupakan masyarakat berbasis teknologi, "teknologi kunci untuk mewujudkan masyarakat ini adalah *big data*, *artificial intelligence*, dan *internet of thing* (IoT), sehingga perlu menciptakan kemampuan baru

Di sisi lain, pada era industri 4.0 seperti sekarang ini, kualitas pekerja Indonesia masih jauh dari kata ideal. Padahal dengan SDM yang berkualitas perekonomian suatu negara dapat berkembang secara optimal dan mampu bersaing dengan negara-negara lain di tingkat global. Bila mencermati data yang dikeluarkan Bank Dunia, dimana pada tahun 2020 Bank Dunia menyebutkan bahwa kualitas SDM Indonesia berada di peringkat 107 dari 189 negara. Sementara itu, di tahun yang sama, Business World memaparkan bahwa peringkat daya saing SDM Indonesia berada di ranking 45 dari 63 negara. Peringkat ini masih kalah dari dua negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia yang masing-masing berada di peringkat 13 dan 22.

Tantangan selanjutnya merujuk pada data Susenas Maret 2020, terkait angka pernikahan dini. Angka pernikahan dini (untuk perempuan yang menikah pertama di usia ≤ 16 tahun) Provinsi Lampung masih tergolong tinggi di Sumatera. Perempuan yang menikah pertama di usia ≤ 16 tahun Provinsi Lampung mencapai 14,54 persen atau tertinggi ketiga setelah Provinsi Sumatera Selatan (16,54) dan Provinsi Bengkulu (15,71 persen). Meskipun angkanya masih di bawah angka nasional (14,88), namun beberapa provinsi di Sumatera angka tersebut sudah berada di bawah dua

digit seperti Provinsi Sumatera Utara (5,34 persen), Provinsi Kepulauan Riau (5,36), beserta provinsi lainnya. Angka, 14,54 persen menunjukkan bahwa 14 di antara 100 perempuan atau 1 di antara 7 perkawinan dilakukan perempuan di Provinsi Lampung pada usia 16 tahun ke bawah.

Pernikahan dini merupakan sebuah paradigma bagi sebagian masyarakat Indonesia bahwa pernikahan dini dapat mengubah nasib anak-anak untuk kehidupan yang lebih baik. Namun tentunya akan lebih baik jika seorang kartini muda diberi kesempatan menunda usia perkawinan sehingga mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, memiliki kesempatan kerja yang lebih baik, dan meningkatkan standar hidup sekaligus dapat memutus siklus kemiskinan antargenerasi. Upaya untuk menghapuskan pernikahan dini perlu dipertimbangkan banyak pihak. Terobosan nyata diperlukan secara integratif untuk mengakhiri pernikahan anak melalui pendekatan keluarga, sekolah, keagamaan dan kebijakan pemerintah.

Dalam konteks ketenagakerjaan, Laporan Bank Dunia menjelaskan bahwa para pekerja Indonesia masih didominasi lulusan pendidikan rendah. Hal ini menandakan kualitas pekerja Indonesia belum cukup kompetitif dibanding negara-negara lain. Kualitas pekerja yang rendah berakibat pada produktivitas output yang tidak optimal. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2019, sebesar 42,30 persen tenaga kerja di Provinsi Lampung memiliki tingkat pendidikan SD ke bawah diikuti dengan tingkat pendidikan SMP dan sederajat sebesar 22,43 persen.

Di samping itu, kontribusi para pekerja sektor informal pada perekonomian Provinsi Lampung tergolong cukup besar. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2020, 72,26 persen tenaga kerja merupakan tenaga kerja informal. Persentase pekerja informal mengalami peningkatan sebanyak 3,77 persen poin dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu (Agustus 2019).

Berdasar uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa tantangan dan pengembangan SDM di Provinsi Lampung masih cukup besar. Pembangunan SDM dan pembangunan ekonomi diibaratkan dua sisi mata uang yang tidak dapat saling dipisahkan. Pembenahan segala aspek dan bidang harus terintegrasi dan sinergis dilakukan agar Provinsi Lampung semakin kompetitif, maju, dan sejahtera.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 54 Telukbetung, Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 482909 Faks. (0721) 474329
Email: bps1800@bps.go.id, Situs: www.lampung.bps.go.id

ISSN 1907-4565



9 771907 456504